



LAPORAN KEGIATAN

PENELITIAN DASAR INTERDISIPLINER

**“GERAKAN SOSIAL Eks HIZBUT TAHRIR
INDONESIA PASCA PEMBUBARAN
(Studi Kasus di Bengkulu)”**

Disusun Oleh:

Nama	Dra. Nurul Fadhillah, M.Pd
NIP	196109071989022002
Nama	Sepri Yunarman, M.Si
NIP	199002102019031015

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
(LPPM)INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
KEMENTERIAN AGAMA RI**

2021

**LAPORAN KEGIATAN
PENELITIAN DASAR INTERDISIPLINER
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
(LPPM)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN 2021**
Alamat Jalan Raden Patah Pagar Dewa Kota Bengkulu, Telp. (0736) 51171-
51172

Nomor : Istimewa Bengkulu, Desember 2021
Lamp : 1 (Satu) berkas
Perihal : **laporan kegiatan Penelitian Dasar Interdisipliner
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
(LPPM) Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Tahun
2021**

Kepada Yth,
Bapak Rektor IAIN Bengkulu
di-
Bengkulu

Assalamu'alaikum wr.wb

Salam silaturahmi kami sampaikan semoga kita senantiasa selalu mendapatkan rahmat dan taufiq dari Allah SWT, Aamiin.

Sehubungan dengan telah selesainya pelaksanaan kegiatan penelitian Dasar Interdipliner, Lembaga Penelitian dan pengabdian masyarakat (LPPM) Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Tahun 2021 dengan judul: “Gerakan Sosial Eks Hizbut Tahrir Indonesia Pasca Pembubaran (Studi Kasus di Bengkulu). Maka dengan ini saya melaporkan hasil kegiatan tersebut sebagaimana terdapat

pada lampiran .

Demikian surat laporan ini disampaikan, atas perhatiannya
dicuapkan terima kasih .

Wassalamu'alaikum wr.wb

Ketua peneliti,

Dra. Nurul Fadhilah, M.Pd

NIP.196109071989022002

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil 'alamin Peneliti mengucapkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan nikmat dan kemampuan kepada peneliti, sehingga kegiatan penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Kegiatan yang dilaksanakan atas kerjasama dengan LPPM IAIN Bengkulu. Semoga Allah SWT Melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kaum muslimin dan muslimat, dan civitas akademika.

Shalawat serta salam tidak lupa dihanturkan kepada junjungan umat Islam Nabi Muhammad SAW, nabi akhir zaman penutup sekalian nabi dan menjadi suritauladan bagi seluruh umat manusia.

Peneliti mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan penelitian ini, semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal. Kemudian peneliti mohon maaf jika terdapat kekeliruan dan kesalahan selama kegiatan ini berlangsung.

Demikianlah penyampaian laporan ini, semoga menjadi bahan pertimbangan LPPM IAIN Bengkulu untuk meningkatkan kegiatan penelitian bagi dosen di lingkungan IAIN Bengkulu.

Bengkulu, Oktober 2021
Peneliti

Dra. Nurul Fadhilah, M.Pd
NIP.196109071989022002

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
KATA SAMBUTAN	
KATA PENGANTAR.....	
EKSECUTIVE SUMMARY	
DAFTAR ISI.....	
LAPORAN HASIL PENELITIAN	
LAPORAN KEGIATAN.....	
LAPORAN ANTARA.....	
DAFTAR PUSTAKA.....	
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Rumusan Masalah.	9
C. Tujuan Peneltian	10
D. Urgensi Penetian	10
E. Keluaran Penelitian	10
F. Kontribusi Penelitian.....	11
G. Penelitian terdahulu	12
BAB II KERANGKA TEORITIS	19
1. Gerakan Sosial	19
2. Sterategi Gerakan Sosial	32
3. Karakteristik Gerakan Sosial.....	42
4. Sejarah Masuknya eks HTI ke Indonesia.....	48
BAB III METODE PENELITIAN.....	57
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	57
B. Informan Penelitian.....	58

C. Waktu dan Tempat Penelitian.....	59
D. Teknik Pengumpulan Data.....	60
E. Teknik Analisis Data.....	62
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	63
1. Hasil penelitian	63
A. Sekilas Tentang HTI Pasca Pembubaran	63
B. Gerakan Sosial HTI Pasca Pembubaran	70
a. Eksistensi Gerakan Sosial HTI di Bengkulu	70
b. Pola Gerakan Sosial HTI Pasca Pembubaran.....	88
c. Tahap-Tahap Gerakan Social eks HTI DI Bengkulu	100
2. Pembahasan dan Teoritis	107
a. Eksistensi Gerakan Sosial HTI di Bengkulu.....	108
b. Pola Gerakan Sosial HTI Pasca Pembubaran	116
c. Tahap-Tahap Gerakan Social eks HTI DI Bengkulu	121
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	128
1. Simpulan	128
2. Saran	131
3. DAFTAR PUSTAKA	

Eksecutive Summary

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan dan Inayah-Nya kepada semua hambahnya. Shalawat teriring salam semoga selalu tercurakan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai uswah bagi seluruh alam semesta.

Berikut ringkasan Kegiatan Penelitian Dasar Interdisipliner, Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Tahun 2021 dengan judul: “GERAKAN SOSIAL Eks HIZBUT TAHRIR INDONESIA PASCA PEMBUBARAN (Studi Kasus di Bengkulu), yang berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor 0088 tanggal Juli Tahun 2021 tentang pelaksanaan Penelitian Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Tahun 2019, dan Perjanjian Kerja/Kontrak Pelaksanaan Penelitian Antara Penyelenggaraan Penelitian (LPPM IAIN Bengkulu) dengan pelaksanaan penelitian Nomor 2395/In.11/L.IPP.00.9/07/2021 tanggal 22 Juli 2021. Pembiayaan kegiatan ini bersumber dari DIPA Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tahun anggaran 2021 nomor 025.04.307995/2021 tanggal 23 November sesuai Standar biaya masukan dan peraturan yang berlaku.

Kegiatan ini dipersiapkan dan diresemikan dengan baik dan melalui prosedur yang benar, dengan diawali pengajuan proposal, seminar proposal , pengajuan surat izin penelitian, pengambilan data dan lain sebagainya. Pada

tahapan pelaksanaan penelitian mengambil dan mengumpulkan data baik melalui Observasi, Wawancara, dan Pengamatan. Kemudian peneliti menganalisa hasil data yang telah dikumpulkan dan menulisnya. Setelah itu, menyampaikan hasil penelitian ke pihak LPPM untuk dipresentasikan ulang di forum diskusi hasil penelitian di LPPM.

Setelah kegiatan penelitian dan seminar hasil selesai dilakukan, peneliti melakukan perbaikan dan penyempurnaan hasil penelitian sesuai dengan masukan-masukan dari peserta dan juga reviewer. Peneliti menyusun laporan dengan sambil mengumpulkan dan menyiapkan bahan-bahan untuk laporan, seperti dokumentasi, materi absensi, nota dan lain sebagainya, sambil konsultasi dengan pihak keuangan. Lalu, menyampaikan laporan ke pihak terkait dan laporan di buat 4 rangkap.

Indikator keluaran yang di peroleh dan pelaksanaan kegiatan ini jelas dan dapat dirasakan oleh peneliti, Instansi dan prodi maupun masyarakat, di harapkan kegiatan seperti ini selalu dapat dilakukan dan difasilitasi oleh IAIN Bengkulu pada tahun berikutnya.

LAPORAN HASIL PENELITIAN

Penelitian Dasar Interdisipliner, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Institut agama islam negeri bengkulu tahun 2021 dengan judul “Gerakan Sosial Eks Hizbut Tahrir Indonesia Pasca Pembubaran (Studi Kasus di Bengkulu).

A. Latar Belakang

Gerakan reformasi pada tahun 1998 telah membuka kan kebebasan sosial di Indonesia. Menurut Kemendagri total ada 406.700 ormas yang telah terdaftar di pemerintah pusat pada tahun 2018. Salah satu ormas tersebut adalah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), cabang dari organisasi Hizbut Tahrir (HT) Internasional yang telah didirikan oleh Syaikh Taqiyuddin Al-Nabahani di Palestina pada tahun 1953. HTI diakui eksistensinya secara resmi pada tahun 2006. Indonesia satu-satunya Negara yang mengakui HT secara resmi. Sejak itu HTI semakin aktif mengkampanyekan ide tentang pentingnya ummat Islam di Indonesia kembali kepada Khilafah (Seminar, Talkshow. Aksi-aksi demonstrasi dll). Namun di dalam perjalanannya, beberapa kelompok organisasi masyarakat menilai gerakan HTI mengarah kepada paham radikalisme. Dimana paham ini dianggap dapat mengancam eksistensi Pancasila dan UUD 1945. Bahkan dalam kegiatan yang dilaksanakan HTI dilapangan justru berbenturan dengan banyak pihak, baik dari

kelompok Islam (NU, MUI dll) maupun dengan rezim pemerintah.

Pada akhirnya pemerintahan Joko Widodo ikut terlibat memantau dan mengkaji ideologi Khilafah yang digaungkan oleh HTI. Pada kesimpulannya, Pemerintah juga menilai bahwa HTI tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Sehingga membubarkan HTI dengan menerbitkan Perppu Ormas No 2 tahun 2017. Meskipun telah dibubarkan oleh pemerintah, masih banyak hipotesis yang menunjukkan bahwa gerakan eks HTI masih tetap berjalan, baik di Indonesia secara umum maupun di Bengkulu Secara khusus. Oleh karena itu, secara khusus penelitian bertujuan untuk mengkaji tentang bagaimana dinamika gerakan sosial eks HTI setelah dibubarkan khususnya di wilayah provinsi Bengkulu. Apakah ada gerakan perlawanan yang bangun oleh eks HTI untuk menentang kebijakan pemerintah, jika ada apa saja bentuk gerakan perlawanan tersebut serta bagaimana harapan-harapan eks HTI terhadap pemerintah Indonesia kedepan.

B. Tujuan

Penelitian ini penting untuk dilakukan dengan alasan, *Pertama* : fenomena penelitian belum pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, khususnya di provinsi Bengkulu sehingga hasil penelitian akan menambah khasanah baru dalam dunia akademis. *Kedua* : penelitian ini bertujuan untuk melakukan pemetaan potensi gerakan radikalisme dalam

kelompok Ormas keagamaan di Bengkulu. Dimana menurut survey BNPT nasional pada tahun 2017 provinsi Bengkulu ditetapkan sebagai wilayah tertinggi akan paham radikalisme di Indonesia. Apakah eks HTI termasuk kedalam kelompok yang menyumbang angka tersebut atau tidak. *Ketiga*, substansi penelitian ini masuk kedalam visi kementerian Agama dalam mengembangkan konsep Moderasi Beragama di dalam masyarakat Indonesia. Sehingga hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan masukan pemerintah membuat kebijakan untuk mencegah pemikiran dan tindakan radikalisasi yang mengatas namakan agama.

C. Sasaran

Adapun sasaran penerapan dari hasil penelitian adalah distribusi responden tentang pandangan eks HTI Bengkulu terhadap kebijakan pembubaran, hasil yang didapatkan peneliti lebih objektif dan kompleks. Dalam hal ini peneliti dapat mendapatkan wawasan yang lebih komprehensif tentang gerakan sosial eks HTI pasca dibubarkan oleh pemerintah khususnya di provinsi Bengkulu. Karena informasi tentang fenomena ini belum banyak diketahui oleh masyarakat umum. Distribusi responden tentang Bagaimana dampak serta bentuk transformasi gerakan sosial eks HTI Bengkulu pasca pembubaran

Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai informan yaitu: pertama, informan utama dan informan pendukung. Informan utama

dalam penelitian ini adalah eks pengurus dan anggota eks HTI di provinsi Bengkulu. Adapun informan pendukung dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang mengetahui seluk-beluk organisasi HTI, seperti pihak pemerintah, pimpinan ormas Islam ataupun masyarakat umum.

D. Deskripsi Pelaksanaan Kegiatan

1.1. Waktu dan Tempat

Waktu penelitian dan penulisan e book ini selama 5 bulan terhitung mulai bulan Juni-November 2021 bertempat di Bengkulu. Namun baru berjalan 3 bulan dan akan diselesaikan dalam 2 bulan lagi ini.

1.2. Kronologis Kegiatan

Berdasarkan pengumuman dari lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat (LPPM) Institut Islam Negeri (IAIN) Bengkulu bagi dosen IAIN Bengkulu Tentang Penelitian dosen tahu 2021 dengan syarat dan ketentuan yang berlaku .

Maka setelah pengumuman tersebut dikeluarkan, selanjutnya membentuk peneliti penyusunan proposal, lalu di upload ke website litabimas dan hard copy diajukan ke LPPL IAIN Bengkulu untuk mengikuti seminar proposal. Setelah proposal dinyatakan layak untuk dilanjutkan penelitian dengan ditandai oleh SK Rektor IAIN yang berisikan nama-nama peserta peneliti dan judulnya, barulah para peneliti membuat jadwal peneliti dan memulai mengajukan surat izin

penelitian ke LPPM dan surat tugas Kepala Biro AUAK yang selanjutnya ke lapangan.

Kemudian peneliti menghimpun data melalui wawancara, pengamatan dan juga mencari buku-buku yang dapat memberikan informasi tentang hal-hal yang mempunyai hubungan dengan penelitian, seperti di perpustakaan. Dari referensi yang dikumpulkan lalu dianalisis hasil wawancara, pengamatan dan lainnya diketik dan dianalisis sesuai dengan rumusan masalah.

Setelah peneliti melakukan pengumpulan data dan membahasnya, penelitian mempersentasikan didepan para audiensi yang telah peneliti undang-undang sebelumnya, kegiatan ini juga disebut dengan fokus group discussion, dimana dalam FGD ini hasil penelitian akan dipaparkan dengan jelas, peserta pun diberikan kesempatan untuk bertanya atau menanggapi apa yang telah di presentasikan.

**LAPORAN ANTARA
PENELITIAN DASAR INTERSIPLINER
(LITAPDIMAS)**



**PENELITIAN DASAR INTERDISIPLINER
“GERAKAN SOSIAL Eks HIZBUT TAHRIR
INDONESIA PASCA PEMBUBARAN
(Studi Kasus di Bengkulu)”**

Peneliti

Nama	Dra. Nurul Fadhillah, M.Pd
NIP	196109071989022002
Nama	Sepri Yunarman, M.Si
NIP	199002102019031015

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
(LPPM)INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
KEMENTERIAN AGAMA RI
2021**

**GERAKAN SOSIAL Eks HIZBUT TAHRIR
INDONESIA PASCA PEMBUBARAN
(Studi Kasus di Bengkulu)”**

(Penelitian Kluster Penelitian Dasar Interdisipliner)



Peneliti

Nama	Dra. Nurul Fadhillah, M.Pd
NIP	196109071989022002
Nama	Sepri Yunarman, M.Si
NIP	199002102019031015

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
(LPPM)INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
KEMENTERIAN AGAMA RI**

2021

BABI PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Gerakan reformasi pada tahun 1998 telah membuka kebebasan sosial politik bagi warga negara Indonesia. Setelah lebih kurang 32 tahun dikungkung oleh rezim militeristik orde baru, maka bangsa Indonesia dapat menyongsong era keterbukaan dan kebebasan di segala lini kehidupan masyarakat, sebagaimana tertuang dalam pasal 28 e ayat 3 UUD 1945 yang menjamin setiap warga untuk dapat bebas berserikat, berkumpul serta mengeluarkan pendapat di muka umum.

Akibatnya, animo masyarakat untuk mendirikan ormas sebagai wadah perkumpulan, baik perkumpulan sosial, ekonomi, politik dan keagamaan sangat tinggi. Menteri Dalam Negeri, Cahyo Kumolo menyebutkan bahwa total ada 406.700 ormas yang telah terdaftar di pemerintah pusat pada tahun 2018 yang lalu. Mayoritas ormas tersebut juga memiliki struktur sampai tingkat provinsi, kabupaten kota, kecamatan bahkan hingga kelurahan/desa (www.cnnindonesia.com, diakses pada 20 April 2021).

Salah satu ormas yang mengambil peran di era kebebasan tersebut adalah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). HTI merupakan salah satu cabang dari organisasi Hizbut Tahrir (HT) Internasional yang telah didirikan oleh Syaikh Taqiyuddin Al-Nabahani di Palestina pada tahun 1953. Secara historis, kelahiran HT didasari pada kondisi keterpurukan ummat Islam diberbagai belahan dunia akibat penjajahan barat dalam waktu yang cukup lama. Adapun secara normatif, kelahiran HT merupakan upaya para pendirinya untuk menjalankan perintah Allah untuk berdakwah secara terorganisir dalam menegakkan amar ma'ruf nahi

munkar (Taqiyuddin, 2001 :4).

Tidak dipungkiri bahwa HT merupakan salah satu gerakan Islam kontemporer yang mendunia. Namun sedikit berbeda dengan gerakan Islam lainnya, HT menyebut organisasinya sebagai partai politik. Meskipun juga berbeda dengan partai politik yang ada diberbagai Negara. Dimana HT merupakan partai politik Islam yang bersifat transnasionalisme. Dimana HT memiliki ideologi politik yang berupaya untuk menyatukan dunia-dunia Islam dalam satu wadah besar yakni sistem “Khilafah” (Afif dan Khalish, 2009 : 5).

Meskipun belum berusia satu abad, namun pengaruh ideologi HT cukup masyhur diberbagai Negara di dunia. Bahkan gerakan HT berhasil masuk ke Negara- negara besar yang telah memiliki ideologi mapan seperti Amerika Serikat, Jerman, Inggris dan Negara-negara bekas Uni Soviet. Sementara itu, pola perjuangan HT sangat khas dibanding dengan pola gerakan Islam lainnya. Mereka seringkali membentuk konfrontasi dengan pihak pemerintah. Sangat berbeda misalnya dengan kelompok Islam Ikhwanul Muslimin yang sering bersikap adaptif dan kooperatif dengan para penguasa setempat. Hal ini menjadi ciri yang membuat HT semakin populer ditengah masyarakat. Karena dianggap gerakan Islam alternatif yang dapat menjawab kegagalan gerakan Islam selama ini (Jamhari dan Jajang, 2004:161).

Gerakan HT masuk ke Indonesia dengan menggunakan cover ormas dengan nama Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Pada dasarnya riak gerakan HTI telah ada pada awal reformasi, namun ia baru diakui eksistensinya secara resmi pada tahun 2006 dimasa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yhudoyono.

Secara *de jure* HTI terdaftar di Dirjen Kesbangpol Kemendagri dengan status organisasi sosial keagamaan yang berasaskan Pancasila serta tunduk terhadap UUD 1945. HTI mendapat tempat istimewa di Negara Indonesia, karena satu-satunya Negara yang mengakui HT secara resmi (Jamhari dan Jajang, 2004 : 162).

Dengan mendapatkan pengakuan resmi dari pemerintah tersebut, disatu sisi HTI semakin aktif mengkampanyekan ide tentang pentingnya ummat Islam di Indonesia kembali kepada Khilafah. Namun disisi lain, HTI juga terlibat aktif dalam memberikan kritik dimuka umum baik lewat media massa ataupun aksi demonstrasi terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai merugikan ummat Islam. Dalam menegakkan misinya, HTI cenderung tidak ingin mengambil jalur konstitusional, karena menurut mereka tujuan akhir gerakan HTI untuk menegakkan system khilafah glonal yang terintegrasi dalam kedaulatan tunggal Negara Islam (Wahid A, 2009 : 154).

Namun di dalam perjalanannya, beberapa kelompok organisasi masyarakat menilai gerakan HTI mengarah kepada paham radikalisme. Dimana paham ini dianggap dapat mengancam eksistensi Pancasila dan UUD 1945.

Bahkan dalam kegiatan yang dilaksanakan HTI dilapangan justru berbenturan dengan banyak pihak, baik dari kelompok Islam itu sendiri maupun dengan rezim pemerintah. Sebagai sesama ormas, Nahdatul 'Ulama (NU) merupakan salah satu ormasbesar yang sering terjadi perbedaan dengan HTI. Salah satu aksi gelombang besar penolakan warga Nahdliyin terhadap HTI terjadi di Jawa Timur misalnya. Dimana warga Nahdliyin diwakili Banser melakukan

apel besar dan mendeklarasikan kesetiaan pada NKRI dan Pancasila serta dengan tegas menolak ide khilafah. Aksi tersebut diikuti dengan melakukan penertiban spanduk, baliho, poster yang berbaur khilafah yang ada di kota Jombang Jawa Timur. Bahkan deklarasi tersebut juga diikuti oleh puluhan ormas lainnya (www.cnnindonesia.com, diakses pada 21 April 2021).

Penolakan lainnya datang dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang notabene sebagai wadah persatuan seluruh ormas Islam di Indonesia. Menurut pandangan tokoh MUI, HTI telah mengambil jalan yang berseberangan dengan Pancasila. Hal ini didasarkan atas manuver-manuver politik yang dilakukan oleh HTI yang berpotensi membenturkan nilai-nilai Islam dengan ideologi Pancasila. Sehingga agenda HTI dianggap bukan sekedar misi dakwah Islam semata, namun punya agenda politik yang terselubung (www.kompas.com, diakses pada 18 April 2021).

Pada akhirnya pemerintahan Joko Widodo ikut terlibat memantau dan mengkaji ideologi Khilafah yang digaungkan oleh HTI. Pada kesimpulannya, Pemerintah juga menilai bahwa HTI tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Sehingga Presiden dengan resmi mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 tahun 2017 Tentang Ormas. Regulasi ini menjadi dasar HTI dicabut izin operasinya oleh Pemerintah melalui Keputusan Kemenkumham dengan Nomor AHU- 30.AH.01.08 tahun 2017 tentang pencabutan pengesahan pendirian Badan Hukum HTI (Kurniawan, 2018 :4).

Dalam keputusannya, pemerintah beralasan bahwa HTI dibubarkan

karena aktivitasnya dinilai sudah mengarah pada perbuatan yang dapat mengancam keutuhan NKRI. Ideologi khilafah yang dikampanyekan ormas HTI bertujuan membentuk satu kekuasaan politik yang transnasional, dimana ia menaungi banyak Negara dalam satu tanah air. Hal ini tentu berbeda dengan konsep NKRI sebagai sebuah Negara bangsa (nation state) mandiri yang tidak terikat dengan kekuasaan Negara lain. Bisa jadi faktormendapatkan informasi bahwa mereka aktif membangun komunitas-komunitas dakwah sebagai wadah bergerak, diantaranya Komunitas Bengkulu Rindu Islam, Komunitas Anti Riba, Komunitas Indonesia Tanpa Pacaran dan lain sebagainya. Bahkan peneliti sering diberikan tabloid atau Koran berbentuk cetak (Media Al-Wa'ie, Buletin Kaffah) sebagai bahan bacaan terkait pengetahuan Islam serta permasalahan-permasalahan yang dihadapi umat Islam di Indonesia secara aktual.

Dengan demikian, peneliti berkeyakinan kuat gerakan sosial eks HTI masih ada, khususnya di provinsi Bengkulu. Sekalipun secara struktural ormas HTI telah dibubarkan di Indonesia, akan tetapi eksistensi ideologi HTI tetap hidup di masyarakat. Hal ini menguatkan tesis bahwa ideologi itu tidak akan pernah mati di hati pengusungnya, tidak hanya HTI, tapi juga ideologi terlarang lainnya seperti komunisme dan sejenisnya.

Selain itu ada hal yang juga cukup mengusik hati peneliti, berdasarkan hasil survey BNPT pada tahun 2017 disebutkan Provinsi Bengkulu sebagai provinsi tertinggi akan paham radikalisme dengan angka 58,58%, disusul provinsi Gorontalo dengan angka 58,48%, kemudian Sulawesi Selatan dengan angka 58,42%, adapun provinsi Lampung sebesar 58,38% serta provinsi Kalimantan

Utara dengan angka 58,32% (www.bengkuluekspress.com, diakses pada 20 April 2021). Akan tetapi hasil tersebut belum dapat dipastikan apakah juga disumbang oleh paham yang dibawa eks HTI juga atau ormas lainnya.

Oleh karena itu, secara khusus penelitian bertujuan untuk mengkaji tentang dinamika gerakan sosial eks HTI setelah dibubarkan khususnya di wilayah provinsi Bengkulu. Apakah ada gerakan perlawanan yang bangun oleh eks HTI untuk menentang kebijakan pemerintah, jika ada bagaimana bentuk gerakan perlawanan tersebut, bagaimana tahapan-tahapan gerakan sosial yang dibangun serta bagaimana pola-pola gerakan sosial yang terjadi. Sehingga diharapkan hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberi masukan kepada pemerintah, baik tingkat provinsi maupun nasional untuk membuat kebijakan dalam mengatasi konflik sosial secara nasional, baik antara sesama organisasi masyarakat ataupun antara ormas dengan negara yang dapat mengancam keutuhan NKRI.

B. Rumusan Masalah

1. Adakah gerakan perlawanan eks HTI Bengkulu pascapembubaran?
2. Bagaimana tahapan-tahapan gerakan sosial yang dibangun eks HTI Bengkulu?
3. Bagaimana pola-pola gerakan sosial eks HTI Bengkulu saat ini?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk gerakan perlawanan eks HTI Bengkulu pasca pembubaran?
2. Untuk mengetahui bagaimana tahapan gerakan sosial yang dibangun eks HTI Bengkulu?

3. Untuk mengetahui bagaimana pola gerakan sosial eks HTI Bengkulu saat ini?

D. Urgensi Penelitian

Penelitian ini penting untuk dilakukan dengan alasan, *Pertama* : fenomena penelitian belum pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, khususnya di provinsi Bengkulu sehingga hasil penelitian akan menambah khasanah baru dalam dunia akademis. *Kedua* : penelitian ini bertujuan untuk melakukan pemetaan potensigerakan radikalisme dalam kelompok Ormas keagamaan di Bengkulu. Dimana menurut survey BNPT nasional pada tahun 2017 provinsi Bengkulu ditetapkan sebagai wilayah tertinggi akan paham radikalisme di Indonesia. Apakah eks HTI termasuk kedalam kelompok yang menyumbang angka tersebut atau tidak. *Ketiga*, substansi penelitian ini masuk kedalam visi kementerian Agama dalam mengembangkan konsep Moderasi Beragama di dalam masyarakat Indonesia. Sehingga hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan masukan pemerintah membuat kebijakan untuk mencegah pemikiran dan tindakan radikalisasi yang mengatasnamakan agama.

E. Keluaran Penelitian

Berdasarkan keputusan Dirjen Pendis Nomor 7322 tahun 2020 tentang petunjuk teknis program bantuan penelitian berbasis standar biaya keluaran pada perguruan tinggi keagamaan Islam tahun 2021, maka kluster penelitian dasar interdisipliner memiliki tiga output penelitian yakni :

1. Laporan penelitian lengkap
2. Draft artikel yang akan diterbitkan pada jurnal nasional terakreditasi

3. Dummybuku

F. Kontribusi Penelitian

Secara akademis, hasil penelitian ini nanti diharapkan dapat memberi kontribusi dalam pengembangan mata kuliah seperti Konflik Sosial ataupun Dakwah Islam di Prodi-Prodi tertentu seperti Prodi pendidikan IPS, Prodi Manajemen Dakwah khususnya yang ada di IAIN Bengkulu, ataupun prodi umum yang ada di Universitas lainnya.

Secara praktis, kegunaan penelitian ini adalah sebagai panduan bagi para pengambil kebijakan, khususnya pemerintah dan organisasi ke-Islaman dalam mencegah proses radikalisasi dalam kelompok Islam serta sebagai rujukan dalam pengelolaan konflik sosial berbasis agama yang terjadi dimasyarakat agar tidak menimbulkan perpecahan yang dapat mengancam keutuhan NKRI.

G. Penelitian Terdahulu

Peneliti bukanlah orang pertama dalam mengkaji masalah HTI, namun telah banyak penelitian terkait yang telah dilakukan peneliti sebelumnya. Namun dalam hal ini peneliti hanya mengemukakan beberapa hasil penelitian yang cukup relevan dengan judul penelitian yang akan kami lakukan. Diantaranya penelitian Dwi yang dilakukan pada tahun 2017 yakni tentang Manifestasi Politik Identitas HTI dikalangan Nadliyin di Kabupaten Jombang Jawa Timur. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dakwah HTI juga masuk kedalam internal warga NU, tentu dengan melakukan penyesuaian-penyesuaian yang sesuai dengan tradisi keagamaan warga NU. Seperti budaya penghormatan terhadap kiyai-kiyai NU, serta penyamaan dalam bidang paham keagamaan lainnya. Akan tetapi hasil

penelitian juga menunjukkan bahwa kaum HTI tetap konsisten dengan ide khilafah yang mereka usung sejak awal yakni menjadikan khilafah tegak di bumi Indonesia khususnya, dan dunia pada umumnya.

Kemudian penelitian berikutnya dilakukan oleh Abdul dan Kiki pada tahun yang sama di Provinsi Lampung. Mereka mengkaji tentang eksistensi gerakan ideologi HTI sebelum dan sesudah dibubarkan. Temuan penelitian menghasilkan beberapa hal, diantaranya bentuk aktivitas HTI sebelum dibubarkan mereka fokus melakukan metode perjuangan politik identitas, dimana HTI banyak melakukan gerakandemonstrasi, seminar dan diskusi publik dengan mengundang tokoh-tokoh, juga melakukan publikasi kegiatan melalui media-media massa. Adapun pola rekrutmen yang mereka lakukan yakni dengan melakukan pendekatan interpersonal, setelah itu menyelenggarakan halaqoh sebagai sarana indoktrinasi. Sementara itu, setelah HTI resmi dibubarkan oleh pemerintah, maka ada dua alternatif jalan yang akan mereka tempuh, yakni membentuk ormas baru atau partai politik.

Selanjutnya kajian yang dilakukan oleh Kurniawan pada tahun 2018 dengan menela'ah pembubaran HTI ditinjau dari perspektif Kewarganegaraan Liberal dan Kewarganegaraan Republik. Hasil penelitian menemukan bahwa jika ditinjau dari perspektif kewarganegaraan liberal, kebijakan pemerintah melakukan pembubaran terhadap ormas HTI statusnya tidak sah. Dikarenakan Perpu yang diterbitkan pemerintah dapat dijadikan alat pengekan serta merenggut kebebasan dalam berorganisasi. Akan tetapi jika dilihat dari perspektif kewarganegaraan republikanisme, pembubaran terhadap HTI sah-sah saja. Hal ini

didasari bahwa ide dan gagasan yang diusung HTI dianggap tidak sejalan dengan hukum Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Berikutnya, ada juga Azman melakukan kajian tentang Gerakan dan Pemikiran Hizbut Tahrir Indonesia pada tahun 2018. Azman melakukan analisis deskriptif tentang latar belakang kelahiran Hizbut Tahrir Indonesia, profil pendiri Hizbut Tahrir Indonesia, serta pemahaman dan aktivitas keagamaan Hizbut Tahrir Indonesia. Hasilnya disimpulkan bahwa HTI merupakan gerakan Islam komtemporer yang mendunia. Akan tetapi berbeda dengan gerakan Islam pada umumnya, HTI menamakan dirinya sebagai sebuah partai politik meskipun juga berbeda dengan partai politik yang ada. Ia lebih kepada sebuah partai politik Islam global yang non parlemen yang memiliki visi menyatukan dunia Islam dalam satu kekuasaan politik system khilafah.

Adapun Kamilatul Fitriyah pada tahun 2016 juga mengkaji HTI dari perspektif Cara Dakwah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Yogyakarta. Ia melakukan studi pada sebuah kegiatan yang disebut angkringan dakwah (talk show) yang dikelola HTI Yogyakarta. Ia menganalisis bagaimana proses pelaksanaannya serta apa saja hambatan serta solusi dalam melaksanakan kegiatan tersebut.

Dari kelima penelitian diatas, tentu saja penelitian yang akan dilakukan ini memiliki perbedaan yang signifikan. Secara umum, penelitian diatas dikelompokkan atas dua bagian, pertama penelitian yang mengkaji tentang sejarah dan metode dakwah HTI di Indonesia. Kedua penelitian yang mengkaji tentang pembubaran HTI serta dinamika gerakan sosialnya. Adapun penelitian ini

masuk ke bagian kedua yakni mengkaji gerakan sosial HTI pascadibubarkan.

Penelitian ini tidak meneliti ketersinggungan antara HTI dengan NU sebagaimana yang dilakukan oleh Dian di Jawa Timur. Tidak juga mengkoreksi kebijakan pemerintah Indonesia terkait pembubaran HTI sebagaimana dilakukan oleh Kurniawan. Penelitian Abdul dan Kiki lebih memiliki kemiripan dengan penelitian yang dilakukan ini. Hanya saja penelitian ini memiliki kajian yang lebih dalam. Jika Abdul dan Kiki hanya mengkaji eksistensi HTI di Indonesia sebelum dan setelah pembubaran terkhusus di provinsi Lampung, maka penelitian ini lebih fokus mengkaji tentang Bagaimana pandangan eks HTI Bengkulu terhadap kebijakan pembubaran, dampak pembubaran terhadap dinamika gerakan sosial eks HTI Bengkulu serta Bagaimana transformasi gerakan sosial eks HTI Bengkulu pasca pembubaran.

Dari kelima penelitian diatas, tentu saja penelitian yang akan dilakukan ini memiliki perbedaan yang signifikan. Secara umum, penelitian diatas dikelompokkan atas dua bagian, pertama penelitian yang mengkaji tentang sejarah dan metode dakwah HTI di Indonesia. Kedua penelitian yang mengkaji tentang pembubaran HTI serta dinamika gerakan sosialnya. Adapun penelitian ini masuk ke bagian kedua yakni mengkaji gerakan sosial HTI pascadibubarkan.

Penelitian ini tidak meneliti ketersinggungan antara HTI dengan NU sebagaimana yang dilakukan oleh Dian di Jawa Timur. Tidak juga mengkoreksi kebijakan pemerintah Indonesia terkait pembubaran HTI sebagaimana dilakukan oleh Kurniawan. Penelitian Abdul dan Kiki lebih memiliki kemiripan dengan penelitian yang dilakukan ini. Hanya saja penelitian ini memiliki kajian yang

lebih dalam. Jika Abdul dan Kiki hanya mengkaji eksistensi HTI di Indonesia sebelum dan setelah pembubaran terkhusus di provinsi Lampung, maka penelitian ini lebih fokus mengkaji tentang Bagaimana pandangan eks HTI Bengkulu terhadap kebijakan pembubaran, dampak pembubaran terhadap dinamika gerakan sosial eks HTI Bengkulu serta Bagaimana transformasi gerakan sosial eks HTI Bengkulu pasca pembubaran.

BAB II

KERANGKA TEORITIS

1. Gerakan Sosial

Pada saat ini, kita banyak menyaksikan fenomena gerakan sosial atau perlawanan yang semakin meluas di tengah-tengah masyarakat dalam upaya menentang dan mendorong perubahan kebijakan publik, perubahan politik dan sosial yang secara luas, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. Terjadi Perlawanan semacam itu, bukan saja terjadi di negara-negara yang tergolong masih menerapkan sistem politik otoritarian, transisional, dan tingkat ekonomi bangsa yang masih terbelakang dan berkembang. Hal yang sama juga terjadi di negara-negara yang selama ini tergolong maju dan demokratis.

Di Indonesia, misalnya tumbangnya rezim Otoritarian Orde Baru Soeharto Mei 1998 kiranya tidak bisa dilepaskan dari peran gerakan sosial, khususnya gerakan mahasiswa, yang pada gilirannya menghantarkan bangsa ini ke dalam kondisi yang lebih demokratis (Denny, 2006). Gerakan pemuda ini sesungguhnya sudah diwakili oleh gerakan prodemokrasi sejak tahun 1870-an, seperti gerakan petani, pers, partai politik, serta kelompok-kelompok intelektual dan cendekiawan. Dengan kata lain, perlawanan-perlawanan sporadis dan temporer ini telah menciptakan prakondisi bagi gerakan mahasiswa yang diibaratkan berada pada posisi “di puncak sebuah gelombang” sehingga memungkinkan mereka mencapai garis akhir (Budiman dan Tornquist, 2001).

Selain Soeharti, penguasa otoriter yang mampu bertahan cukup lama di Asia Tenggara lainnya, seperti Ne Win di Burma dan Ferdinand Marcos di Filipina, juga tumbang setelah berhadapan dengan protes rakyat yang terjadi secara masif dan meluas. Sulit untuk membayangkan tumbanganya rezim-rezim ini tanpa gerakan rakyat, yang meskipun selama kekuasaannya dibungkam dan direpresi (Boudreau, 2002).

Sejak tahun 1960-an, gerakan sosial, aksi protes, dan organisasi politik semakin berkembang dan menjadi komponen yang tidak terpisahkan dalam perjalanan demokrasi di negara-negara Barat. Kekuatan yang mempengaruhi lanskap politik di sana tidak lagi didominasi kekuatan konvensional, yakni partai politik dan serikat-serikat pekerja. Kini gerakan sosial dinilai.

Gerakan sosial sejatinya tidak bisa dipisahkan dari sejarah perkembangan dunia, karena sebuah perubahan atau sebuah usaha untuk menghambat perubahan di dalam masyarakat merupakan bagian dari perkembangan sejarah gerakan sosial masyarakat. Markoff (2002:44) menyatakan bahwa suatu gerakan sosial dapat dikatakan terbuka apabila ada pernyataan yang secara eksplisit mengajak ke arah perubahan. Dengan Tujuan-tujuan dan nilai-nilai. Dari gerakan ini secara esensial bersifat universal, yakni diarahkan untuk memberikan perlindungan dan mempertahankan kondisi kehidupan manusia ke arah yang lebih baik.

Masyarakat merupakan sekumpulan individu yang dibentuk berdasarkan kesamaan pandangan, aturan, dan tujuan yang sama. Dalam perkembangan dinamika kehidupan masyarakat sering kali terdapat fenomena menarik yang muncul di masyarakat, fenomena tersebut dikenal dengan istilah konflik sosial.

Konflik sosial seringkali muncul akibat dari pertentangan atau pun perjuangan atas nilai-nilai dan klaim-klaim atas status, kekuasaan, dan sumber daya. (Harskamp, 1996:5).

Konflik sosial seringkali di maknai sebagian masyarakat sebagai hal yang patologis. Namun, secara fungsional konflik sosial dapat membawahkan pengaruh positif, dimana dengan adanya konflik sosial akan terbangun dan menguat adaptasi atau penyesuaian hubungan-hubungan sosial atau kelompok. (Coser, 1964, Harskamp 1996). Dalam masyarakat Kepentingan-kepentingan yang diperjuangkan oleh setiap individu atau kelompok akan menempuh langkah serta membentuk pola-pola strategis demi pencapaian tujuan yang ingin dicapai, dalam konteks ini gerakan sosial sering kali digunakan sebagai instrumen yang efektif untuk menunjang suatu tujuan yang ingin dicapai.

Gerakan sosial dapat dipahami sebagai suatu fenomena sosial yang dilakukan oleh suatu kelompok tertentu dalam memperjuangkan kepentingan yang berkaitan dengan isu-isu sosial dan politik dalam masyarakat. Gerakan sosial dapat dikategorikan sebagai aksi kolektif. Akan tetapi, terdapat perbedaan yang mendasar jika dibandingkan dengan bentuk-bentuk aksi kolektif lainnya. Perlu diketahui bahwa, gerakan sosial tidak hanya sekedar sekumpulan orang yang berkumpul untuk mencapai kepentingannya tetapi juga bagaimana kelompok tersebut dapat merubah sistem atau struktur masyarakat secara fundamental. Tindakan yang dilakukan biasanya akan selalu berfokus ke satu bidang yaitu politik, sosial, dan lain sebagainya. Munculnya gerakan sosial juga menandakan negara yang demokratis maka dari itu, masyarakat memiliki hak untuk

bertindak mengadakan perbaikan karena suatu sistem atau struktur yang melenceng. Berikut ini, penulis akan memaparkan terkait definisi perilaku kolektif dan bagaimana perbedaan gerakan sosial dan perilaku kolektif yang lainnya.

Menurut Abdul Wahid Situmorang (Tarrow, 1998: 13), gerakan sosial adalah tantangan kolektif yang di ajukan sejumlah orang yang memiliki tujuan dan solidaritas yang sama, dalam konteks interaksi yang berkelanjutan dengan kelompok elite, lawan, dan penguasa. Tarrow menambahkan, dalam gerakan terdapat lima aspek penting yang terangkai pada setiap gerakan sosial. Kelima aspek tersebut antara lain: (a) Setiap gerakan sosial terdapat penekanan pada gerakan-gerakan, (b) Menyusun aksi mengacau (disruptive) melawan kelompok elite, dan aturan-aturan budaya tertentu, (c) Dilakukan atas nama tuntutan yang sama terhadap lawan, penguasa dan kelompok elite, (d) Berasal pada rasa solidaritas atau identitas kolektif, dan (e) Terus melanjutkan aksi kolektifnya sampai menjadi sebuah gerakan sosial. Dengan demikian secara garis besar gerakan sosial diikuti oleh sejumlah individu yang memiliki tujuan dan identitas kolektif yang sama yang secara bersama-sama terlibat dalam aksi kolektif yang bertujuan mengacau. (Bert, 2005: 12).

Sedangkan menurut Klandermans (2005: 366), gerakan sosial adalah fenomena dari perubahan sosial dan dari kerusakan tatanan sosial serta kerusakan pertalian yang berhubungan dengan perubahan sosial. Dalam kajian ini Klandermans mengungkapkan bahwa gerakan sosial lahir di dasari oleh beberapa faktor yang muncul di dalam suatu komunitas masyarakat, dimana faktor-faktor

yang mempengaruhi munculnya gerakan sosial tersebut antara lain: *strain* (ketegangan), *stress* (stres), *mass society* (massa), *emotion* (emosi), *irrationality* (ketidakrasionalan), *contagion* (penularan perasaan), *alienation* (keterasingan), *frustration* (frustasi) atau, *relative deprivation* (deprivasi relatif).

Penelitian yang kami lakukan ini menggunakan kerangka teori gerakan sosial Sidney Tarrow. Memang dalam kajian tentang gerakan sosial, ruang lingkup kajiannya cukup luas. Sehingga beragam pakar telah menjelaskan tentang konsep gerakan sosial (social Movement). Salah satunya adalah sosiolog Anthony Giddens. Ia menyatakan bahwa gerakan sosial merupakan suatu upaya bersama suatu kelompok masyarakat untuk mencapai tujuan bersama atau suatu gerakan untuk mencapai tujuan didasari tindakan kolektif di luar lembaga-lembaga formal (Fadillah dkk, 2006 : 3).

Sedikit berbeda dengan konsep gerakan sosial Giddens, Tarrow (1998 : 4-5) mendefinisikan gerakan sosial sebagai tantangan kolektif yang dilakukan oleh sekelompok orang yang memiliki tujuan dan solidaritas, dalam konteks interaksi yang berkelanjutan dengan kelompok elite, lawan atau penguasa. Disini terdapat 4 kunci penting, yakni tantangan kolektif, tujuan bersama, solidaritas sosial dan interaksi berkelanjutan.

Konsep gerakan sosial menurut Tarrow ini bisa kita ambil contoh dalam peristiwa gerakan reformasi di Indonesia pada tahun 1998. Dimana seluruh elemen masyarakat melakukan gerakan bersama secara serentak diseluruh wilayah Indonesia dengan tujuan yang sama yaitu melengserkan presiden Soeharto sebagai kepala Negara karena kebijakannya dianggap telah merugikan seluruh

kepentingan rakyat Indonesia. Akibat gerakan rakyat yang besar dan massif ini membuat Soeharto kehilangan legitimasi politik sehingga harus mengundurkan diri sebagai pemegang otoritas kekuasaan paling tinggi di Indonesia.

Peneliti memilih teori gerakan sosial Tarrow sebagai pisau analisa dalam penelitian ini karena dianggap relevan dengan realitas serta data yang dibutuhkan di lapangan nantinya. Dalam hal ini, ada sebuah kelompok masyarakat (ormas HTI) secara sepihak telah dibubarkan oleh rezim pemerintah tanpa melalui proses pengadilan yang objektif. Sebagai pihak yang dirugikan oleh kebijakan pemerintah, maka peneliti ingin melihat bagaimana bentuk serta dinamika perjuangan yang dilakukan oleh eks HTI dalam memperjuangkan agenda politiknya di NKRI.

Salah satu penyebab gerakan sosial adalah framing (pembingkaihan). Framing dapat kita pahami sebagai suatu bentuk cara pandang individu terhadap fenomena yang dipengaruhi oleh ideologi di dalam dirinya. Dengan kata lain, frame menentukan sikap individu terhadap suatu fenomena. Frame dalam gerakan sosial adalah skema interpretasi yang memberikan kemampuan individu untuk mengidentifikasi suatu fenomena yang sedang terjadi di sekitarnya. Framing dalam gerakan sosial lebih dapat dianggap sebagai cara atau strategi yang digunakan untuk menyamakan pandangan baik dari pelaku maupun dari masyarakat terhadap suatu isu tertentu (Tarrow : 1998). Menurut Tarrow (1998), framing bertujuan untuk menjustifikasi, memuliakan, dan mendorong aksi kolektif. Dengan membuat framing, maka individu-individu akan memiliki pemahaman yang sama, solidaritas yang sama untuk bergerak mencapai suatu

tujuan bersama. Secara umum, suatu gerakan sosial membutuhkan tiga frame, yaitu:

1. Agregate Frame, adalah proses pengartian isu sebagai masalah sosial. Individu yang mendengar frame dari peristiwa tersebut sadar bahwa isu tersebut adalah masalah bersama yang berpengaruh di setiap individu.
2. Consensus Frame, adalah proses definisi yang berkaitan dengan masalah sosial hanya dapat diselesaikan dengan tindakan kolektif. Hal ini mengkonstruksi perasaan dan identifikasi dari individu untuk bertindak secara kolektif.
3. Collective Action Frame, adalah proses yang memaparkan kenapa dibutuhkan suatu tindakan kolektif, serta tindakan kolektif apa yang harus dilakukan.

Selain itu, gerakan sosial juga memiliki komponen-komponen didalamnya. Suatu gerakan sosial dapat dikatakan sebagai sebuah interseksi dari adanya unsur-unsur yang ada pada fenomena sosial. Unsur yang dimaksud memiliki berbagai macam bentuk, seperti aksi sukarela, asosiasi sukarela, professionalized reform, kepentingan kelompok, kebijakan sosial, negara, partai politik, perubahan sosial, media massa, discourse & ideology, opini public, perilaku kolektif dan aksi individu.

Menurut Tarrow (1998), komponen dasar yang harus dimiliki dalam gerakan social adalah sebagai berikut :

a. Struktur

Gerakan sosial baru memiliki struktur yang tidak kaku, bersifat mengalir, untuk menghindari bahaya oligarkisasi. Hal itu diwujudkan dengan adanya upaya rotasi kepemimpinan, melakukan voting untuk semua isu, memiliki organisasi ad-hoc yang tidak permanen. Gerakan sosial baru menciptakan struktur yang lebih responsif terhadap kebutuhan individu dalam bentuk struktur yang terbuka, terdesentralisasi, dan non-hierarkis.

b. Tantangan Kolektif

Gerakan social selalu ditandai adanya tantangan-tantangan untuk melawan melalui aksi langsung yang mengganggu para elit, pemegang otoritas, kelompok-kelompok lain atau aturan-aturan cultural tertentu. Tantangan kolektif juga ditandai dengan tindakan menghalangi, membuat ketidakpastian terhadap aktivitas pihak lain yang coba mereka lawan melalui gerakan sosial. Tantangan kolektif merupakan karakteristik yang paling umum dari gerakan sosial. Tantangan kolektif seringkali disimbolkan dalam bentuk, slogan, corak pakaian, perilaku pribadi, penamaan baru objek-objek yang familiar dengan simbol yang baru ataupun berbeda, dan lain-lain. Tantangan kolektif merupakan hal yang menjadi titik fokus bagi para aktor gerakan dengan keadaan sekarang dan bermigrasi dengan harapan memperoleh masa depan lebih baik.

1. Gerakan ekspresif (expresive movement), yaitu tindakan penduduk

untuk mengubah sikap mereka sendiri dan bukan mengubah masyarakat. Individu- individu dalam jenis gerakan ini sebenarnya hanya merubah persepsi mereka terhadap lingkungan luar yang kurang menyenangkan dari pada mengubah kondisi luar itu sendiri.

2. Gerakan utopia (utopian movement), yaitu gerakan yang bertujuan menciptakan lingkungan sosial ideal yang dihuni atau upaya menciptakan masyarakat sejahtera yang berskala kecil.
3. Gerakan reformasi (reform movement), yaitu gerakan yang berupaya memperbaiki beberapa kepincangan atau aspek tertentu dalam masyarakat tanpa memperbarui secara keseluruhan.
4. Gerakan revolusioner (revolutionary movement), yaitu gerakan sosial yang melibatkan masyarakat secara tepat dan drastic dengan tujuan mengganti sistem yang ada dengan system baru.
5. Gerakan regresif (reaksioner), yaitu gerakan yang berusaha untuk mengembalikan keadaan kepada kedudukan sebelumnya. Para individu yang bergabung dalam gerakan ini adalah orang-orang yang kecewa terhadap kecenderungan sosial yang sedang berjalan.
6. Gerakan perlawanan (resistance movement), yaitu gerakan yang berusaha melawan perubahan sosial tertentu.
7. Gerakan progresif (progressive movement), yaitu gerakan yang bertujuan memperbaiki masyarakat dengan cara mengadakan perubahan-perubahan positif pada lembaga-lembaga dan organisasi-organisasi.

8. Gerakan konservatif (conservative movement), yaitu gerakan yang berusaha menjaga agar masyarakat tidak berubah. Individu-individu yang mendukung gerakan ini menganggap bahwa kedudukan masyarakat pada saat sekarang sebagai kedudukan yang paling menyenangkan.

Dari teori di atas bahwa gerakan sosial lahir dari aksi terhadap sesuatu yang tidak diinginkan rakyat atau menginginkan perubahan kebijakan karena dinilai tidak adil, lebih singkatnya bahwa gerakan sosial adalah gerakan yang lahir dari prakarsa masyarakat dalam menuntut perubahan dalam institusi, kebijakan atau struktur pemerintah.

2. Strategi Gerakan Sosial

Strategi merupakan cara atau metode untuk melakukan sesuatu dalam rangka mencapai tujuan usaha-usaha apa yang dilakukan untuk mencapai tujuan gerakan apa ada tujuan utama dari setiap strategi yang digunakan dalam mencapai tujuan itu, akan lebih menekankan yaitu pada perubahan institusi-institusi sosial (societal manipulation) ataukah dengan mengubah hati dan pemikiran orang-orang (personal transformation) strategi yang digunakan bersifat terbuka atau tertutup, terang-terangan atau tersembunyi menggunakan strategi penyerangan frontal atau pengikisan 'pendirian' mereka dinyatakan secara halus (polite), melalui aksi protes atau kekerasan mekanisme taktik yang digunakan terhadap kelompok sasaran: persuasi, negosiasi atau paksaan.

Strategi Gerakan Sosial menyebut pentingnya proses framing dalam memahami sukses tidaknya sebuah gerakan sosial. Dalam teoritisasi gerakan sosial menggagas suatu konsep skema mengenai meaning construction dengan menggunakan term yang disebut Framing. Konsep tentang frame atau pembedaan itu sendiri diperkenalkan oleh Erving Goffman (David, 2002:39). Cara ini merupakan meyakinkan kelompok sasaran yang beragam dan luas sehingga mereka terdorong mendesakkan sebuah perubahan. Komponen utama dari proses framing adalah gerakan diagnosis elemen atau mendefinisikan masalah dan sumbernya serta memprediksi elemen sekaligus mengidentifikasi strategi yang tepat untuk memperjuangkan masalah tersebut.

Snow menambahkan bahwa proses framing collective action frames adalah skema interpretasi yang merupakan sekumpulan beliefs and meaning, berorientasi pada aksi yang menginspirasi dan melegitimasi aktivitas sebuah organisasi gerakan sosial. Dalam hal ini, frame dibangun untuk memberikan makna dan menginterpretasi kejadian tertentu, yang dimaksudkan untuk memobilisasi potensi pengikut, serta untuk mendapatkan dukungan pihak lain. Sehingga, melalui proses Framing tersebut, para aktor gerakan sosial akan saling menilai kemampuan terhadap “tipe sumber daya” dengan “kemampuan mobilisasiaksi” dalam beberapa tingkatan. Setelah melakukan pembedaan, langkah selanjutnya adalah dengan menyusun strategi yang hendak digunakan dalam menjalankan aksinya.

Suharko (Putra, 2006:11) menyatakan begitu banyak strategi atau taktik gerakan sosial yang bisa dipakai untuk mencapai tujuan-tujuan gerakan sosial.

Pemilihan strategi tersebut berdasarkan atas pengamatan terhadap konteks atau setting politik tertentu, pertimbangan pihak lawan yang dihadapi, isu yang dibidik, dan kekuatan serta sumberdaya yang dimiliki oleh organisasi gerakan sosial tersebut. Model dan pilihan inilah yang harus dikembangkan ditingkat praktis supaya aksi dari gerakan sosial tersebut sesuai dengan harapan.

Strategi tersebut juga mengerucut menjadi empat variasi strategi yang dapat memuat garis besar pengertian dan kaidah umum strategi gerakan sosial, yakni sebagai berikut:

a. *Low Profile* Strategi

Fisher (Putra, 2006:11) menyebut strategi ini sebagai strategi “isolasi politik” yang secara khusus sesuai dengan konteks politik yang represif dan efektif untuk menghindari kooptasi dari pemegang kekuatan yang otoritan.

b. Strategi Pelapisan (*layering*)

Fowler (dalam Putra, 2006:12) menyebut strategi ini sebagai strategi *Layering*. Strategi ini sangat sesuai untuk organisasi gerakan sosial yang beroperasi di negara-negara yang membatasi aktivitas otonom di luar pemerintah. Pelapisan adalah pengembangan penyediaan pelayanan yang berorientasi kesejahteraan yang sebenarnya berisikan metode dan aktivitas yang berorientasi pemberdayaan dan transformasi sosial.

Organisasi gerakan sosial bisa menghindari diri dari aksi dan intervensi langsung dari pihak-pihak lawan. Pihak lawan atau pihak-pihak di luar organisasi gerakan sosial melihatnya sebagai upaya peningkatan

kesejahteraan, sedangkan pihak yang berada di dalamnya melihatnya sebagai metode pemberdayaan yang kompleks.

c. Strategi Advokasi

Sebagaimana dijelaskan oleh Suharko (dalam Putra, 2006:13), yang menyatakan tidak dapat dipungkiri bahwa strategi advokasi atau yang biasa disebut pendampingan merupakan strategi utama yang digunakan oleh kalangan NGO (*Non Government Organization*) baik di negara-negara maju maupun di negara-negara berkembang. Strategi advokasi seringkali digunakan untuk mendesakkan perubahan-perubahan sosial. Ketika dikombinasikan dengan kampanye media dan aliansi dengan donor asing, strategi ini membuat NGO bisa menjadi kekuatan pengubah kebijakan yang kuat, khususnya pada isu-isu di mana mereka punya banyak pengalaman. Akan tetapi, ketika masyarakat enggan turun ke jalan untuk bergabung dalam demonstrasi dan protes massal, maka NGO yang mempunyai basis keanggotaan besar dan jaringan yang luas seringkali berusaha membangun protes dengan menyebarkan surat dan pernyataan resmi kepada publik, pemerintah maupun agen internasional.

d. Keterlibatan Kritis (*Critical Engagement*)

Suharko (Putra, 2006:13-14), menyatakan berbagai organisasi gerakan sosial, terutama NGO berupaya mengkombinasikan strategi advokasi dengan strategi kerjasama ketika menghadapi pemerintah atau agen-agen negara lainnya (parlemen, badan-badan yudikatif dan militer). Meskipun kerjasama antara NGO dengan pemerintah lebih lazim dalam

aktivitas penyediaan pelayanan umum, namun dalam rangka mempengaruhi dan mengubah kebijakan publik, NGO bisa mengkombinasikan strategi kerjasama dan advokasi.

Tarrow (dalam Suharko, 2006:5) menambahkan bahwa dalam tantangan kolektif gerakan sosial akan terus dapat hadir dalam simbol seperti slogan, corak, pakaian dan musik, atau penanaman baru objek-objek familiar dengan simbol yang berbeda atau baru. Musik dalam konteks tersebut hadir sebagai sarana propaganda, sehingga tercipta sebuah solidaritas sosial bagi orang banyak.

e. Menggunakan Musik Sebagai Strategi

Inggit (2010:11) menyatakan bahwa musik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia dan sudah menjadi sebuah kebutuhan hidup. Pada dasarnya musik mempunyai berbagai fungsi dalam kehidupan manusia, antara lain: sebagai media ekspresi emosi, kenikmatan estetik, hiburan, alat komunikasi, simbol dalam masyarakat, respon fisik, pengesahan institusi sosial dan ritual agama.

f. Menggunakan Media Sosial Sebagai Strategi

Masyarakat pada dunia digital dan dianggap sebagai dunia tanpa batas, tidak sebatas melakukan interaksi dengan lingkungan sekitar, melainkan mampu melakukan komunikasi dengan teman bahkan rekan yang di luar negeri. Setiap individu hari ini secara intens mampu berinteraksi secara informal dan mengikuti serta menyaksikan berbagai kegiatan di seluruh dunia (Mahoney, dalam Firmanda dan Lalu 2018:6).

Berkembang pesatnya situs jejaring sosial tersebut tentu saja punya dampak positif dan juga negatif, oleh karena itu penting untuk dibuat suatu sistem pengawasan dan bimbingan bagi mereka agar dampak negatifnya dapat dihindari dan dampak positifnya semakin di rasakan. Dari teori tersebut dapat dilihat bahwa setiap gerakan sosial terdapat perubahan. Untuk melihat setiap perubahan tersebut kita bisa menganalisis fenomena yang terjadi di masyarakat apakah tujuannya ke arah lebih baik atau malah sebaliknya.

Selama ini praktek politik organisasi gerakan sosial hanya menjadikan kadernya sebagai *community organizer*. Kader dari gerakan sosial hanya melakukan pengorganisasian dalam rangka pemberdayaan komunitas-komunitas yang tak diuntungkan oleh sistem politik. Berbagai pendidikan yang dilakukan meliputi tentang: pertama, pemetaan kondisi eksternal meliputi aspek sosial, hukum, politik, ekonomi dan budaya; kedua, pemetaan kondisi internal organisasi dan personal organisasi yang meliputi penilaian terhadap struktur organisasi, penilaian terhadap ketersediaan perangkat organisasi dan pelaksanaan misi organisasi. Meskipun sudah dilakukan strategi pemetaan yang dianggap sudah matang, aksi yang dilakukan gerakan sosial tetap saja mendapatkan hambatan dan tantangan.

Hambatan dapat dipahami sebagai faktor yang menghalangi dalam mencapai tujuannya. Kita dapat membedakan hambatan kedalam dua kategori yaitu hambatan internal dan hambatan eksternal. Pertama hambatan

internalgerakan, merupakan serangkaian masalah dalam tubuh gerakan sosial yangdianggap mengganggu dalam mencapai tujuannya. Hambatan internal dapatberupa pola kepemimpinan yang tidak demokratis, tidak ada mekanisme yang

jelas dalam struktur organisasi, keterbatasan waktu aktor gerakan untuk totalitasdalam memperjuangkan tujuan gerakan, dan lain sebagainya. Kedua hambataneksternal gerakan, merupakan permasalahan diluar gerakan dianggap menghalangicita-cita gerakan seperti regulasi yang tak mendukung, tidak mendapatkandukungan dari pihak lain, dan lain sebagainya.

3. Karakteristik gerakan sosial

Della Porta dan Diani (1999:13-16) menawarkan sedikit karakteristik utuama gerakan sosial, Yaitu (1) jaringan interaksi normal; (2) perasaan dan solidaritas bersama; (3) konflik sebagai fokus aksi kolektif; dan (4) mengedepankan bentuk-bentuk protes. Dengan kata lain, gerakan sosial merupakan jaringan-jaringan informal yang mendasarkan diri pada perasaan dan solitaritas bersama, yang tujuan memobilisasi isu-isu konfliktual, melalui berbagai bentuk protes yang dilakukan secara terus-menerus. Hal ini pula yang membedakan gerakan sosial dengan gerakan yang dilakukan oleh partai politik, kelompok kepentingan, sekte-sekte agama, protes sesaat, atau koalisi politik sesaat.

Dalam pembentukan gerakan sosial, tentunya terdiri dari berbagai macam individu yang berbeda-beda. Individu-individu yang tergabung dalam suatu gerakan sosial memiliki karakteristik tertentu. Pertama, individu-individu yang

memiliki komitmen utama untuk mewujudkan tujuan tertentu. Kedua, individu-individu yang mendukung pencapaian tujuan dari gerakan sosial tersebut. Ketiga, individu-individu yang menikmati dirinya sebagai bagian dari suatu gerakan sosial. Karakteristik ini cenderung dimiliki individu yang tidak berpendirian teguh. Keempat, individu-individu yang ingin mengetahui berbagai kegiatan yang dilakukan dalam gerakan sosial. Kelima, individu-individu yang mempergunakan gerakan sosial sebagai wadah perwujudan kepentingan pribadi mereka (Muzaqqi, 2017).

Berdasarkan berbagai jumlah karakteristik di atas, gerakan sosial dibagi menjadi lima macam. Pertama, gerakan sosial alternatif. Gerakan sosial ini cenderung tidak mengancam, serta hanya merubah hal-hal tertentu saja, tergantung pada anggotanya. Kedua, gerakan sosial *redemptive* atau penebusan. Gerakan sosial ini cenderung memiliki fokus tersendiri dan mengarah pada perubahan yang radikal. Ketiga, gerakan sosial reformatif. Gerakan sosial ini cenderung merubah hal-hal tertentu dalam masyarakat, namun berfokus pada seluruh anggota masyarakat. Keempat, gerakan sosial revolusioner. Gerakan sosial revolusioner merupakan gerakan sosial yang paling keras, dimana gerakan sosial ini memperjuangkan adanya transformasi masyarakat secara mendasar. Kelima, gerakan sosial keagamaan. Gerakan sosial keagamaan merupakan gerakan yang berusaha melahirkan perubahan radikal pada suatu individu, dan cenderung mengandalkan kepercayaan secara spiritual maupun supernatural. Dari berbagai jenis gerakan sosial yang telah diketahui, terdapat sejumlah contoh gerakan-gerakan sosial yang berjalan secara efektif di Amerika Serikat. Salah

satunya gerakan anti globalisasi, gerakan buruh, hak asasi wanita, hak sipil, hak-hak kaum *gay*, dan lain sebagainya (Muzaqqi, 2017).

Gerakan sosial pada dasarnya dapat dipahami kedalam bentuk elemen yang terdapat dalam fenomena sosial, seperti kampanye, repertoar serta WUNC *display* yang terdiri atas banyak bagian. Dalam hal ini, WUNC *display* dapat dikatakan sebagai partisipasi masyarakat sosial dalam membentuk adanya gerakan public untuk memperjuangkan kepentingan, yang didalamnya terdapat unsur kesatuan antaranggota, jumlah, serta komitmen yang menjadi dasar untuk memperjuangkan gerakan sosial yang ada (Tilly, 2004). Salah satu gerakan sosial yang cukup populer dalam abad 20 yakni adanya gerakan *American Civil Rights*. Dalam gerakan tersebut, Martin Luther memberikan sebuah pidato “I Have a Dream” di depan Lincoln Memorial pada Maret 1963 di Washington. Gerakan ini pada dasarnya berupaya untuk memperjuangkan hak kebebasan yang ada dalam masyarakat (Muzaqqi, 2017).

Gerakan sosial dapat dikatakan sebagai interseksi dari adanya unsur-unsur yang ada pada fenomena sosial. Unsur yang dimaksud memiliki berbagai macam bentuk, seperti aksi sukarela, asosiasi sukarela, *professionalized reform*, kepentingan kelompok, kebijakan sosial, negara, partai politik, perubahan sosial, media massa, *discourse & ideology*, opini public, perilaku kolektif dan aksi individu. Untuk menjelaskan adanya suatu gerakan sosial dalam suatu masyarakat sosial dapat dipahami melalui enam teori, yakni teori *deprivation*, teori marxis, teori mobilisasi sumberdaya, teori *structural-strain*, teori proses politik dan teori baru gerakan sosial. Teori *deprivation* pertama kali muncul pada tahun 1970-an

yang dipicu oleh adanya fenomena pemberontakan yang dilakukan oleh masyarakat dalam sistem sosial. Asumsi utama teori ini menyatakan bahwa adanya gerakan sosial dipengaruhi oleh adanya penindasan yang dilakukan kelompok satu dengan kelompok lain (Muzaqqi, 2017).

Selanjutnya, teori marxis merupakan suatu teori yang pertama kali diperkenalkan oleh Karl Marx. Marxis dapat dikatakan sebagai salah teori yang memiliki pengaruh besar terhadap praktek yang ada dalam gerakan sosial. Kemunculan teori marxisme ini didasari atas konflik struktur sosial yang melibatkan antara pekerja atau buruh dengan pegawai kapitalis dalam suatu industry pada abad ke 19. Kemudian pada abad ke 20, muncul teori neo-Marxis yang mulai berkembang sehingga melibatkan aspek lain, seperti ras, gender, lingkungan serta hal lain yang memiliki hubungan dengan keadaan ekonomi politik. Teori Marxis dapat dikatakan sebagai teori yang cukup relevan dalam memahami peran ekonomi politik serta perbedaan kelas-kelas dalam gerakan sosial seperti yang ada pada era saat ini (Muzaqqi, 2017).

Gerakan sosial memiliki karakteristik yang membedakannya dengan gerakan lainnya, karakteristik tersebut antara lain: (1) Dilakukan secara kolektif, Kolektif berarti dilakukan lebih dari satu individu yang membentuk kesatuan. (2) Gerakan sosial pada umumnya dilakukan oleh sekompok orang dalam jumlah yang besar atau banyak. Terorganisir, Gerakan sosial diatur dalam suatu kesatuan, sesuai dengan tatanan atau kaidah yang berlaku. Terorganisir berarti memiliki struktur, tata cara, tujuan, anggota, akses yang terarah dan jelas. Dalam hal ini, terorganisir sama dengan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. (3) Serta

Memiliki Ideologi, Adanya ide-ide maupun pemikiran kemudian memunculkan ideologi yang dapat dijadikan dasar pada sebuah gerakan sosial. Ideologi adalah konsep yang tersistem yang dijadikan dasar yang memberikan arah dalam kehidupan, yang berupa cara berpikir dari sekelompok orang, meliputi kumpulan arti nilai, ide, norma, kepercayaan, dan keyakinan dalam menentukan tindakan dalam dinamika sosial politik. (4) dan Yang bersifat dinamis, Salah satu tujuan dari gerakan sosial adalah merubah sistem atau tatanan sosial yang berlaku di masyarakat. Dinamis dalam hal ini berarti gerakan sosial bertujuan untuk melakukan pembaruan pada keadaan sosial politik yang dinilai stagnan, jadi tidak cenderung kaku. Selain itu, juga untuk mewujudkan tatanan kehidupan sosial yang baru dan sesuai dengan harapan masyarakat.

4. Sejarah masuknya HTI ke Indonesia

Menurut M. Imdadun Rahmat (2005: 97-99), proses masuknya HT ke Indonesia terjadi pertama kali pada tahun 1982 melalui M. Mustofa dan Abdurrahman al-Bagdadi. Mustofa adalah putra Abdullah bin Nuh, pengasuh pesantren al-Gazali Bogor, seorang ulama dan sekaligus dosen fakultas sastra UI. Mustofa adalah alumnus Perguruan Tinggi di Yordania. Dia berkenalan dan bergabung dengan HT ketika menjadi mahasiswa di Yordania. Sedangkan Abdurrahman berasal dari Libanon yang bermigrasi ke Australia dan kemudian tinggal di Indonesia atas permintaan Abdullah bin Nuh untuk membantu dia mengajar di pesantren. Abdurrahman menjadi aktivis HT sejak dia berumur lima belas tahun.

Keduanya, M. Mustofa dan Abdurrahman al-Bagdadi, adalah aktivis HT yang pertamakali mengenalkan pemikiran-pemikiran HT di Indonesia melalui para mahasiswa IPB yang juga santri ayah Mustofa di al-Gazali. Fathul Hidayah adalah mahasiswa yang pertama kali dikenalkan dengan pemikiran-pemikiran HT yang kemudian menjadi penggerak HT pada masa-masa awal. Fathul Hidayah beserta teman-temannya seperti Asep Saifullah, Adian Husaini, Hasan Rifai al-Faridi dan lainnya meneruskan kegiatan-kegiatan *halaqah*, sosialisasi dan pembangunan jaringan di bawah bimbingan Abdurrahman dan Mustofa. Pemikiran-pemikiran HT ini kemudian mereka sebarkan ke berbagai daerah melalui jaringan kampus termasuk ke Yogyakarta. Adapun masuknya HT ke Yogyakarta, menurut Rasyid, terjadi pada tahun 1992, 10 tahun setelah masuk pertama kali ke Indonesia yaitu ke Bogor.

Memiliki Ideologi, Adanya ide-ide maupun pemikiran kemudian memunculkan ideologi yang dapat dijadikan dasar pada sebuah gerakan sosial. Ideologi adalah konsep yang sistem yang dijadikan dasar yang memberikan arah dalam kehidupan, yang berupa cara berpikir dari sekelompok orang, meliputi kumpulan arti nilai, ide, norma, kepercayaan, dan keyakinan dalam menentukan tindakan dalam dinamika sosial politik. Salah satu tujuan dari gerakan sosial adalah merubah sistem atau tatanan sosial yang berlaku di masyarakat. Di Provinsi mayoritas agama Islam, ketika terjadi fenomena yang membuat masyarakat sengsara seperti yang banyak terjadi saat ini bahkan dengan kondisi Indonesia yang banjir di mana-mana itu disebabkan karena ulah manusia itu sendiri. Dengan maraknya virus corona yang menyebabkan korban

jiwa ada dimana-mana dan hutang negara indonesia yang terlilit hutang yang besar. Melihat kondisi tersebut mulai muncul ide untuk memberi solusi dengan menerapkan islam kaffah. Penulis mendapatkan hasil dari wawancara salah satu ustad yang ada di kota Bengkulu. hidup yang baik untuk masyarakat.

Hizbut Tahri Indonesia (HTI) jika dilihat dari namanya merupakan sebuah partai politik berazas Islam. Namun, di Indonesia organisasi ini lebih memilih untuk berada di luar sistem politik yang ada, sehingga ia lebih tepat disebut ormas. Secara geneologis HTI merupakan organisasi transnasional yang pertama kali berdiri dan berkembang di al-Quds Palestina pada 1953 dengan nama Hizb al-Tahrir (HT). Berdasarkan pada sejarahnya, sebelum didirikan di Palestina, HT pernah mengajukan izin ke pemerintah Yordania melalui Departemen Dalam Negerinya sebagai partai politik. Namun, upaya itu ditolak, bahkan keberadaanya di negara tersebut dilarang karena sebagai organisasi yang ilegal (Abdurrahman 2005, 35-36).

Adapun sejarah HT di Indonesia (kemudian disebut HTI) diawali dari interaksi Kiyai Abdullah bin Nuh, pemilik pesantren Al-Ghazali di Bogor, yang mengajak Abdurrahman Al-Baghdadi, seorang aktiis HT yang tinggal di Australia, untuk tinggal di Bogor sekitar tahun 1982-1983. Kemudian di saat-saat mengajar di pesantren milik Kiyai Abdullah tersebut, Abdurrahman banyak berinteraksi dengan para aktivis masjid dari Masjid Al-Ghifari yang ada di kampus IPB Bogor. Berawal dari sini lah pemikiran Taqiyudin al-Nabhani, pendiri HTI, mulai didiskusikan oleh para mahasiswa. Dalam perkembangannya dibentuklah halaqah-halaqah (forum diskusi atau pengajian kecil) untuk

membahas dan mendiskusikan pemikiran-pemikiran HT yang ada dalam buku-buku yang dikarang oleh Taqiyudin al-Nabhani. Singkatnya, dapat dibilang bahwa para aktivis muda masjid kampus ini lah (khususnya aktivis mahasiswa masjid di IPB) yang kemudian menyebarkan gagasan-gagasan HT, termasuk putra Abdullah bin Nuh, yaitu Muhammad Mustofa, yang sejak lama menjadi aktivis HT sejak ia kuliah di Yordania (Arif 2018, 124). Kemudian dengan memanfaatkan Lembaga Dakwa Kampus (LDK), organisasi HT mulai menyebar di banyak kampus di Indonesia yang berada di luar Bogor, seperti IKIP, UNPAD, UNDIP, UNAIR, bahkan juga banyak berkembang di kampus-kampus agama seperti UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (khususnya pada fakultas-fakultas umum) dan kampus-kampus lain yang berada di luar Jawa, seperti UNHAS dan lainnya.

Perkembangan HT di Indonesia dapat dibilang cukup cepat dan mendapatkan pengikut yang relatif banyak dan menyebar di berbagai daerah di Indonesia, mulai dari Indonesia bagian Barat sampai Indonesia bagian Timur seperti Papua. Setelah menilai memiliki banyak anggota dan mendapat sambutan dari banyak kalangan, HT mengadakan konferensi akbar berskala internasional pertama kali di Indonesia pada 2002 yang bertajuk Khilafah Islamiyah. Kegiatan ini digelar di Istora Senayan yang menghadirkan banyak tokoh HT dari berbagai daerah dan internasional sebagai narasumber dalam acara tersebut. Kegiatan ini sekaligus menjadi petanda bagi lahirnya Hizbut Tahrir Indonesia, yang secara jelas-jelas mendeklarasikan diri sebagai organisasi partai politik dengan berazaskan Islam sebagai ideology organisasi. Namun, perlu dicatat bahwa HTI berbeda dengan partai Islam di Indonesia pada umumnya yang mengikuti

kontestasi dalam pemilu dan/atau pilkada, HTI tidak pernah mau untuk masuk dalam sistem politik yang ada di Indonesia, karena itu ia menjauhkan organisasi dan anggotanya dari proses-proses politik electoral baik itu Pilpres, Pileg, maupun Pilkada (gubernur dan kabupaten/kota). Penolakan ini merupakan bagian dari penolakan HTI atas system politik modern yang dinilai sebagai toghut yang bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam sebagaimana yang mereka pahami. Ini adalah bentuk baku dan pandangan umum dari Hizbut Tahrir dalam skala internasional.

HTI merupakan bagian dari Hizbut Tahrir (HT) pusat (internasional) yang didirikan oleh Taqiyuddin al-Nabhani, ulama berkebangsaan Palestina, pada tahun 1953 di al-Quds, Yordania (Afadlal, 2005: 265). Dalam buku yang berjudul Mengenal Hizbut Tahrir: Partai Islam Ideologis (2002: 1), dijelaskan bahwa HT adalah partai politik (parpol) yang berideologikan Islam. Politik merupakan aktivitasnya dan Islam adalah ideologinya. Sebagai sebuah parpol, jelas bahwa politik merupakan aktivitas utama HT. Menurut Yoyok, humas HTI DPD I DIY (wawancara pada tanggal 10 Januari 2007), aktivitas politik adalah memperhatikan urusan masyarakat sesuai dengan hukum dan pemecahan yang syar'i>. Politik bagi HT pada dasarnya adalah bagaimana mengatur dan memelihara urusan masyarakat sesuai dengan hukum dan pemecahan Islam. HT mendefinisikan dirinya sebagai parpol dengan menegaskan bahwa dirinya bukan kelompok yang hanya berdasarkan pada kerohanian semata, bukan lembaga ilmiah, bukan lembaga pendidikan, dan bukan pula lembaga sosial (Anonim, 2002: 1).

HTI bertujuan Melangsungkan kehidupan Islam dan mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Ini berarti mengajak kaum Muslim untuk hidup secara Islami di dalam Islam dan di dalam masyarakat Islam. Seluruh aktivitas kehidupan di dalamnya diatur sesuai dengan hukum syara'. Pandangan hidup yang akan menjadi pusat perhatiannya adalah halal dan haram, di bawah naungan Daulah Islamiyah, yaitu Daulah Khilafah, yang dipimpin oleh seorang khalifah yang diangkat dan dibaiat oleh kaum Muslim untuk didengar dan ditaati, dan agar menjalankan pemerintahannya berdasarkan Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya. Juga untuk mengemban risalah Islam ke seluruh penjuru dunia dengan dakwah dan jihad" (anonim, 2002: 19).

Dalam hal itu berarti makna dari tujuan HTI adalah untuk menegakan syariat Islam di muka Bumi secara keseluruhan. Meskipun HT menyebut dirinya sebagai partai politik, namun HT bukanlah partai politik sebagaimana parpol pada lazimnya yang menjadi bagian dari sistem politik modern dalam fungsi-fungsi politik. HT memiliki pengertian sendiri tentang politik dan parpol seperti dijelaskan di atas. Oleh karena itu, HTI tidak ikut bergabung dengan partai-partai lainnya yang ada di Indonesia untuk merayakan pesta demokrasi dalam pemilu. Bahkan menurut HTI, demokrasi merupakan sistem kufur.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian Ini menggunakan pendekatan kualitatif dimana semua proses penelitian menggunakan prosedur, metode, serta sudut pandang penelitian kualitatif. Salah satu cirinya dari penelitian kualitatif yaitu data yang dikumpulkan lebih banyak berupa kata-kata atau gambar dan sedikit angka-angka (Sudarwan, 2002 : 58). Selain itu, ciri penelitian kualitatif berikutnya yakni membaca dan menjelaskan realitas masyarakat berdasarkan sudut pandang subyek penelitian, bukan subyektif peneliti (Moleong, 2007 : 6).

Jenis penelitian yang akan dilakukan yakni bersifat penelitian lapangan (*field research*). Jenis *field research* diambil peneliti dalam rangka untuk memperdalam hasil penelitian dengan cara mempelajari keseluruhan dari latar belakang subyek penelitian dilapangan hingga saat ini (Bungin, 2010 : 10). Sedangkan metode penelitian yang diambil bersifat deskriptif, dimana peneliti mengkaji suatu objek penelitian dengan menjabarkan hasilnya secara detail dan runut untuk mengetahui tentang situasi dan kondisi dari subjek yang sebenarnya (Nazir, 2005 : 54).

Diharapkan dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, hasil yang didapatkan peneliti lebih objektif dan kompleks. Dalam hal ini peneliti dapat mendapatkan wawasan yang lebih komprehensif tentang gerakan sosial eks HTI pasca dibubarkan oleh pemerintah khususnya di provinsi Bengkulu. Karena informasi tentang fenomena ini belum banyak diketahui oleh masyarakat umum.

B. Informan Penelitian.

Dalam sebuah penelitian, informan merupakan pihak-pihak yang membantu peneliti untuk menemukan jawaban dari pertanyaan penelitian. Informan penelitian dapat pula disebut sebagai responden yakni pihak memberikan keterangan penting sesuai kebutuhan peneliti (Saiffudin dan Arikunto, 2009:145).

Untuk memilih informan/responden dalam penelitian ini digunakan teknik Purposive Sampling dimana informan dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu dari peneliti yang disebabkan pihak tersebut dianggap dapat memberikan data dengan kualitas tinggi (Sugiyono, 2009 : 218).

Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai informan yaitu: *pertama*, informan utama dan informan pendukung. Informan utama dalam penelitian ini adalah eks pengurus dan anggota eks HTI di provinsi Bengkulu. Adapun informan pendukung dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang mengetahui seluk-beluk organisasi HTI, seperti pihak pemerintah, pimpinan ormas Islam ataupun masyarakat umum.

C. Waktu dan Tempat Penelitian

Berdasarkan waktu yang tersedia, maka penelitian ini akan dilaksanakan selama 5 bulan, yakni dari rentang bulan Juni hingga bulan November pada tahun 2021. Sementara itu, tempat pengambilan data penelitian akan dilakukan di provinsi Bengkulu, baik Kota maupun kabupaten yang memungkinkan peneliti mendapatkan data yang signifikan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan menggunakan teknik pengumpulan data dengan mengikuti metode penelitian kualitatif secara umum yakni dengan melakukan wawancara mendalam, mengobservasi serta melakukan pengumpulan dokumen penting yang terkait dengan topik penelitian. Yang dimaksud dengan wawancara mendalam yaitu peneliti mendatangi informan secara tatap muka kemudian melakukan percakapan yang terarah hingga mendapatkan data-data yang diperlukan (Meleong, 2007 : 64). Namun sebelum melakukan percakapan tersebut, peneliti harus lebih dulu menyiapkan pedoman wawancara (daftar pertanyaan) yang tidak kaku dalam artian bisa dirubah seiring kebutuhan data yang mau didapatkan (Bungin, 2010 :102).

Selain wawancara mendalam, peneliti juga melakukan observasi terhadap subyek penelitian. Observasi disini dimaksudkan ketika peneliti menggunakan pancaindera untuk merekam segala situasi dan kondisi yang terjadi langsung pada informan maupun pada hal-hal disekitar informan kemudian menulisnya kedalam catatan penelitian. Dalam Penelitian ini observasi dilakukan secara non-sistematis dalam arti tanpa adanya instrumen pengamatan yang disiapkan terlebih dahulu (Narbuko, 2007 : 70).

Kemudian peneliti melakukan pengumpulan dokumentasi di tempat penelitian untuk memperoleh data secara langsung. Jenis dokumentasi yang dikumpulkan oleh peneliti dapat berupa barang-barang tertulis yang dapat dibaca dan dipelajari seperti buku-buku, peraturan laporan kegiatan, foto-foto yang terkait langsung dengan fenomena yang diteliti (Saiffudin dan Arikunto, 2009 :

158).

Selanjutnya, diakhir pengumpulan data, peneliti akan mengadakan Focus Groups Discussion (FGD). Dengan FGD ini diharapkan data yang terkumpul lebih komprehensif dari berbagai pihak, termasuk untuk memverifikasi data temuan yang belum akurat. Sehingga data yang ditemukan benar-benar dapat teruji dan diakui oleh semua pihak. Hal ini sesuai dengan prinsip metode penelitian kualitatif yang melakukan triangulasi dalam pengumpulan data.

E. Teknik Analisis Data

Menganalisis hasil penelitian berarti kita melakukan kajian yang komprehensif terhadap temuan-temuan lapangan dan dihubungkan dengan teori-teori yang relevan. Teknik analisis kualitatif dapat dipahami suatu proses yang dilakukan oleh peneliti untuk merangkai temuan penelitian baik hasil wawancara, hasil pengamatan, dokumentasi dan catatan lapangan secara sistematis sehingga menjadi sebuah kesimpulan yang mudah untuk dibaca dan dipahami (Sugiyono, 2009 : 58).

Analisis data kualitatif secara umum memiliki dua model, yakni model Miles dan Huberman dan model Spydley. Dalam penelitian ini, digunakan model analisis Miles dan Huberman yang dimulai dari reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan akhir. Akan tetapi, kesimpulan tersebut tetap masih dapat dikoreksi dan diberi masukan jika masih ada yang tidak cocok dengan temuan penelitian (Iskandar, 2009 :223).

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil penelitian

A. Sekilas Tentang HTI Bengkulu Prapembubaran

Pada bab ini akan diuraikan hasil penelitian yang di ambil dari data responden dari dengan tujuan untuk mengetahui lebih jauh tentang pandangan eks HTI Bengkulu sebelum di bubarkan, hasil yang didapatkan peneliti lebih objektif dan kompleks. Beberapa informan mengatakan bahwa partisipasi awal mereka di training HTI, seminar dan halaqah karena diajak dan didorong oleh keluarga, senior dan perkawanan di antara mereka. Perkembangan HTI di Indonesia dulu dibilang cukup cepat dan mendapatkan pengikut yang relatif banyak dan menyebar di berbagai daerah di Indonesia, mulai dari Indonesia bagian Barat sampai Indonesia bagian Timur seperti Papua. Setelah menilai memiliki banyak anggota dan mendapat sambutan dari banyak kalangan, HTI mengadakan konferensi akbar berskala internasional pertama kali di Indonesia pada 2002 yang bertajuk Khilafah Islamiyah.

Pada awalnya kebanyakan mereka tidak mengetahui bahwa kegiatan tersebut diorganisir oleh HTI. Para perekrut mengajak keluarga dan kawan mereka untuk menghadiri pelatihan dan diskusi HTI dengan dalih untuk mengaji atau belajar Islam dalam rangka meningkatkan pengetahuan agama. Doktrin HTI yang tertanam kuat dalam benak para aktivis HTI membuat mereka begitu aktif mencari anggota baru. Para aktivis HTI memandang dakwah sebagai kewajiban seumur hidup bagi setiap Muslim. Karena itu mereka akan berupaya sekuat tenaga demi tegaknya Khilafah Islamiyah di bumi ini. Untuk mengukur tingkat keberhasilan

rekrutmen anggota baru, setiap minggu dalam pertemuan halaqah, mereka selalu menanyakan dan mengevaluasi sejauh mana perkembangan dakwah mereka, dan menghitung sudah berapa banyak orang yang mereka dekati dalam seminggu.

Selain memanfaatkan jaringan sosial yang telah ada, para aktivis HTI juga aktif mencari anggota baru dengan cara membangun hubungan sosial yang baru. Mereka didorong untuk bersikap terbuka dan aktif membuat pertemanan demi rekrutmen. Ketika menemukan kenalan baru, mereka akan menjaga hubungan silaturahmi tersebut dan mengarahkan kenalan ini untuk ikut ke kegiatan-kegiatan HTI. Jika seseorang menunjukkan animo terhadap ide HTI, maka aktivis HTI akan menjaga kontak dengan orang tersebut dalam rangka mengarahkannya ke kegiatan HTI selanjutnya hingga ia menjadi anggota penuh. Salah seorang informan mengatakan bahwa pada awalnya, ketika mengikuti kegiatan HTI, ia belum yakin untuk masuk ke gerakan tersebut, namun ia terkesan dengan aktivis HTI yang nampak perhatian dan peduli kepadanya, serta tidak henti-hentinya mendekatinya hingga akhirnya ia luluh dan ikut bergabung.

Ada cara unik yang dilakukan oleh HTI dalam rangka kaderisasi, yakni melalui istilah Halaqah. Halaqah adalah kelompok studi dalam bentuk lingkaran. Cara ini dianggap sebagai cara unik dan penting sebagai medium kaderisasi dan indoktrinasi. Menurut Taji-Farouki mendeskripsikan halaqah sebagai bentuk “unit kecil dari anggota partai dan kader baru yang dibentuk sebagai wadah atau medium untuk mengkaji ideologi partai secara intensif dibawah bimbingan seorang anggota senior yang sudah berpengalaman”. Kegiatan setiap halaqahterdiri dari lima anggota baru yang berkumpul duduk mengelilingi seorang

pembina. Dalam setiap halaqah waktu yang dibutuhkan biasanya dua jam. Kehadiran anggota baru dalam halaqah dijadikan status keanggotaan seseorang.

Pada saat wawancara salah satu anggota HTI yang masih ada saat ini di kota Bengkulu sendiri dari segi wilayahnya yang masih tergolong belum begitu maju. Terkadang ada saja masalah yang datang terutama dalam perekonomian masih kurang. Dengan permasalahan yang ada organisasi ini sangat mudah untuk mengajak temannya untuk bergabung.

Dengan mengikuti serangkaian kegiatan tentang oragniasi islam namun dengan seiring berjalannya waktu. HTI ini kajiannya lebih ke politik bukan kajian murni dakwah islam.

Ia mengatakan, pembubaran organisasi resmi tidak bisa dilakukan serta merta, tapi harus melalui proses tahapan berupa teguran sebanyak 3 kali berturut-turut. Selanjutnya baru dilakukan proses pencabutan izin pengadilan. Inipun baru bisa dibubarkan setelah ada keputusan hukum tetap atas perkara tersebut. Namun, apa yang dilakukan pemerintah terhadap HTI merupakan sebuah penyalahgunaan kekuasaan.

Padahal, katanya selama ini HTI telah memberikan kontribusi kepada negara berupa kajian-kajian agama, termasuk membantu pemerintah penganggulangan bencana alam yang terjadi di berbagai tempat di Tanah Air. "HTI tidak anti Pancasila, HTI dalam perjuangannya adalah memerangi neo liberlisme dan ketidakadilan ekonomi. Kita sama sekali tidak anti Pancasila," ujarnya.



Gambar 4.1

Pernyataan di atas di perkuat dengan kajian online yang membahas tentang Pancasila dan Al-Quran di media umat islam. Dalam hal ini haruskah mereka mendakwahkan tentang pancasila dan Al-Quran.

“ Hal senada diungkapkan Koordinator HTI Kota Bengkulu, Us. Ustad Il mengatakan, HTI di Bengkulu tetap beraktivitas seperti biasa. "HTI belum dibubarkan dan kami tetap melakukan aktivitas seperti biasa," ujarnya.

HTI sampai sekarang belum dibubarkan pemerintah, sehingga tidak ada alasan baginya tidak melakukan aktivitas organisasi. Namun demikian, HTI Mukomuko belum mengambil sikap atas masalah ini, seperti aksi turun ke jalan dan sebagainya. Sebab, salah satu dari point pemerintah, katanya akan mengajukan upaya hukum untuk membubarkan HTI. Artinya, pemerintah akan mengajukan upaya hukum ke pengadilan untuk membubarkan organisasi tersebut.

".....Jadi, kami menganggap HTI sampai sekarang belum dibubarkan. Soal isu pembubaran HTI akan kita koordinasikan dengan pengurus di pusat. Yang jelas, sampai sekarang HTI di Kota Bengkulu tetap beraktivitas," ujarnya.

Hal senada diakui Ketua HTI Kabupaten Bengkulu Selatan, Ustad J. Ia mengatakan, sampai saat ini pihak belum menerima keterangan resmi dari pengurus pusat tentang pembubaran HTI oleh pemerintah. Namun, dirinya

memastikan aktivitas HTI berupa dakwah akan tetap dijalankan seperti biasa.

"HTI itu bertugas berdakwah, jadi kita akan tetap berdakwah. Meski demikian, pihak sudah mendengar isu bahwa HTI dibubarkan karena bertentangan dengan Pancasila. "Tidak benar HTI anti Pancasila, justru HTI pancasila dengan berbagai kegiatan yang dilakukan untuk mengajak masyarakat berbuat kebaikan," ujarnya.

Selain itu, tidak ada kegiatan HTI bertentangan dengan aturan hukum. "Organisasi HTI ini tetap menjunjung tinggi NKRI dan berideologi Pancasila," ujarnya. Sementara itu, Kepala Kantor Kesbangpol Mukomuko, Jumaidi mengatakan, sampai saat ini pihak belum mengambil keputusan apapun terhadap keberadaan HTI di daerah ini. "Kita masih menunggu keputusan resmi atas pembubaran HTI. Jika sudah ada keputusan resmi dari pengadilan pembubaran HTI baru bersikap. Sekarang Kesbangpol hanya melakukan monitoring di lapangan atas aktivitas organisasi tersebut di daerah ini," ujarnya.

B. Gerakan Sosial HTI Pasca Pembubaran

a. Eksistensi Gerakan Sosial HTI di Provinsi Bengkulu Pasca Pembubaran.

Pada bab ini akan diuraikan hasil penelitian yang di ambil dari data responden dari dengan tujuan untuk mengetahui lebih jauh tentang pandangan eks HTI Bengkulu terhadap kebijakan pembubaran, hasil yang didapatkan peneliti lebih objektif dan kompleks. Dari hasil wawancara yang kami lakukan informan yang ada di Kota Bengkulu, maka dapat dinyatakan gerakan sosial eks HTI masih tetap ada.

Hal dibuktikan dengan pernyataan langsung informan, maupun dokumentasi kegiatan yang peneliti peroleh di lapangan. Adapun untuk eksistensi gerakan Eks HTI di Provinsi Bengkulu, terpusat di Kota Bengkulu dan juga

tersebar di Kab. Bengkulu Utara, Muko-Muko, Rejang Lebong juga Seluma. Adapun misi mereka tetap Berdakwah untuk menegakkan Khilafah, meskipun tidak dalam wadah HTI lagi.

“....Dakwah itu tidak mesti di HTI, masih banyak wadah lain untuk mendakwahkan Islam. Pemerintah bisa membubarkan HTI, tapi tentu tidak bisa melarang kita berdakwah. Misi untuk menegakkan khilafah Islamiyah tetap menjadi tujuan kita...” (Wawancara Ust IL, Anggota Aktif Eks HTI 17/09/21)

“....Selanjutnya Kegiatan dakwah kita terpusat di Kota Bengkulu, namun anggota kita juga banyak berdomisili di Kab. Bklu Utara, Muko-Muko, Rejang Lebong dan juga sedikit ada di Seluma. Untuk di kabupaten Bengkulu Selatan dan Kaur memang agak vakum, karena penggeraknya sudah pindah ke provinsi Lain....” (Wawancara dengan AR, Anggota Aktif Eks HTI)22/09/21

Dari hasil koordinasi pemda dengan unsur Muspida, baik BINDA, Kepolisian, TNI, FKUB, kita belum menemukan indikasi adanya kegiatan ormas Eks HTI di Bengkulu Selatan, insyaallah kegiatan ormas keagamaan di Bengkulu Selatan masih normal-normal saja. (Wawancara Bupati Bengkulu Selatan)

Peneliti juga mendapatkan data bahwa Kita belum pernah melihat ataupun mendengar adanya kegiatan yang berhubungan dengan ormas Eks HTI di Kabupaten Kaur, baik sebelum mereka dibubarkan ataupun saat ini. Kamipun belum pernah berinteraksi langsung dengan anggota HTI, hanya mengetahui HTI lewat berita-berita media massa...” (Wawancara Pimpinan NU Kab. Kaur)

Banyak yang mengintai setelah di bubarkan. Polisi untuk mengetahui dengan cara membayar agar bisa mengetahui alur HTI tersebut. Ustad IL yang menjadi pentolan pemuda yang aktif di HTI. Setelah dibubarkan makanya membentuk organisasi baru.

Pasca pembubaran tidak ada aksi seperti demo. Dengan diam karena dengan aksi demo akan membuat makin rusak. Fakta-fakta penyalagunaan

kekuasaan edilogi kapitalisme, dan komunisme, sosialisme saat ini. Orang-orang kafir dan orang munafik di posisi anti islam hanya kepentingan yang bersifat ekonomi. Menurut Kurniawan pemerintah mengabaikan proses hukum dalam membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Selain HTI di bubarkan ada juga di tahun 2020 pembubaran FPI. Dimana FPI resmi di larang beraktifitas di Indonesia.

Penyalagunaan kekuasaan juga terjadi korupsi yang kasusnya dana bansos Covid-19. Itu adalah mengambil hak rakyat yang cukup besar. Tentang demokrasi korupsi “wakil ketua komisi I DPD RI dan Fahira Idris tentang apapun demokrasi, pasti selalu ada potensi peraktek penyalagunaan kekuasaan dan kebijakan yang tidak adil.

Di provinsi Bengkulu Alurnya setelah perahu besar (HTI) di bubarkan mulai di bentuk dengan yang nama nya MTR, BKLDK, Bengkulu Beriman, dan dakwah kampus TV. Selain, membentuk sebuah organisasi kecil. Kegiatan tersebut juga melakukan seminar dalam satu tahun sekali. Di Bengkulu termasuk masyarakat yang punya banyak hutang. Untuk menyadarkan hutang agar ribah dan harus melunasi hutang dengan berdakwah berdasarkan Hadis dan Sunah. Salah satu yang di lakukan para anggota HTI yang dulu aktif berdakwah secara terang-terangan. Namun, pada saat ini dengan cara diam-diam dalam menyeruhkan konsep Neraka Islam. Dan HTI masih tetap eksis di Kota Bengkulu dengan cara berdakwah melalui jejaring media sosial.

Meihat fenomena sekarang ini membuat Dunia mahasiswa kembali resah atas kebijakan pemerintah akhir-akhir ini. Sebab, ini bukan pertama kalinya

melainkan yang sekian kalinya kebijakan pemerintah selalu merugikan rakyat Indonesia. Dengan penyalagunaan kekuasaan. HTI pada saat di bubarkan para anggota eks HTI yang di katakan informan anggota HTI yang dulu aktif di organisasi tersebut. di kota Bengkulu HTI tetap Eksis di tengah-tengah masyarakat dengan melakukan gerakan-gerakan baru. Karena berdasarkan informan eks di Bengkulu mereka tetap menjalankan aktifitas dakwah seperti biasa. Melihat fenomena yang makin tidak terarah dari segi bidang ekonomi, politik, pendidikan dan sosial budaya yang semakin tidak terarah. Contoh di bidang ekonomi masyarakat kota Bengkulu masih banyak yang terjerat hutang. Maka pemikiran eks HTI memberikan solusi dengan membentuk komunitas baru atau istilahnya perahu kecil. Tetap menjalankan aktifitas dakwah nya Mempaparkan penjajahan yang masih mecerkram di neregri ini, dengan sdm yang masih dikuasi oleh asing. Kemudian beliau memberikan solusi yang sebenarnya menyelesaikan permasalahan umat saat ini adalah dengan kembali pada islam.

Aktivitas intelektual HTI menemukan ekspresinya lewat seminar dan publikasi. Ini tentu saja merupakan strategi untuk menyebarkan ide-ide HTI dan menarik dukungan dari segmen terdidik dari masyarakat Indonesia. Seminar aktif dilaksanakan mulai dari media online, seperti wa, youtube dan pertemuan seminar di lakukan di Hotel.

Menarik menyitir pendapat dari Kasdi (2002: 21) yang mengungkapkan bahwa terdapat beberapa karakter yang merupakan platform gerakan fundamentalisme, yakni (1) kelompok ini cenderung melakukan interpretasi literal

terhadap teks-teks agama. Menurut mereka pemahaman secara kontesktual terhadap teks-teks agama disebut akan mereduksi kesucian agama; (2) menolak pluralisme dan relativisme. Pluralisme oleh kelompok ini disebut sebagai distorsi dalam pemahaman ajaran agama; (3) memonopoli kebenaran atas tafsir agama. Kaum fundamentalis biasanya menganggap dirinya dan kelompoknya sebagai yang paling benar dalam menafsirkan agama sehingga cenderung untuk menganggap sesat kelompok yang tidak sealiran dengan mereka; (4) gerakan fundamentalisme mempunyai korelasi dengan fanatisme, eksklusifisme, intoleran, radikalisme, dan militanisme. Fundamentalisme selalu melakukan perlawanan terhadap ancaman yang dianggap membahayakan agama.

Jeifa laoe pengurus LDK daerah Bengkulu Bukan saja tentang proses perekonomian tetapi Capitalis bukan saja dianggap suatu pradaban yang radikal pada suatu edilogi dan kemudian mencerminkan adanya gaya hidup dan bukan hal bukan yang tabu lagi. Dari kapitalis adalah adam semit melalui buku 1776 tentang mereka menghendaki di berikan kebebasan untuk berkerja dalam persaingan yang sempurna dengan meniadakan interprensi dari pemerintah. Ini yang merukana menjadi ciri khas dari capitalis.

Menurut hasil wawancara bapak H. Kurniawan salah satu narasumber di BKLDK kota Bengkulu, bahwa beliau melihat kondisi pemerintahan dan politik saat ini sedang di prioritaskan oleh sesuatu yang membuahkan kometmen hilang. Dalam artian hilang terhadap ilmu-ilmu dn konsep-konsep yang di pelajari.

Selain itu hal yang sama disampaikan oleh eks HTI lainnya. Menurutnya, sejak HTI resmi dibubarkan oleh pemerintah, mereka tetap eksis dalam

berdakwah di Bengkulu. Untuk mendapatkan keamanan dalam menjalankan aktivitasnya, mereka mendirikan komunitas baru yang lintas segmen sekaligus dengan simbol-simbol baru yang jauh dari kesan memiliki hubungan dengan ormas HTI. Ada komunitas yang mengarah ke bidang ekonomi seperti MTR (Masyarakat Tanpa Riba), ada komunitas yang bergerak pada Hijrah para pemuda (Indonesia Tanpa Pacaran), ada juga komunitas yang fokus pada gerakan mahasiswa BKLDK (Badan Koordinasi Lembaga Dakwah Kampus) yang menaungi aktifitas mahasiswa dari seluruh kampus. Dengan demikian aktifitas dakwah mereka tidak terhenti dengan kebijakan pembubaran.

“.....Sejak HTI dibubarkan pemerintah ya kami harus terima karena tak mungkin juga untuk melawan. Namun tentu kami harus berpikir untuk buat lembaga baru agar kami tetap dapat mendakwahkan Islam. Lalu didirikanlah secara nasional sampai daerah komunitas baru seperti Masyarakat Tanpa Riba (MTR), ada juga untuk dakwah kepada para remaja dan pemuda komunitas Indonesia Tanpa Pacaran, ada juga untuk lokal Komunitas Bengkulu Rindu Islam, termasuk organisasi di kalangan mahasiswa yaitu BKLDK. Sebagai ganti Organisasi Gema Pembebasan dahulunya..... (Hasil wawancara dengan AR, Eks HTI, 21/08/2021).

Salah satu aktivis mahasiswa eks HTI yang berhasil kami wawancarai juga mengkonfirmasi hal yang sama. Ia menyatakan bahwa saat ini kegiatan mereka tetap aktif. Mereka mengadakan kegiatan-kegiatan eksternal dalam bentuk seminar ataupun talkshow dengan mengundang pemateri nasional membahas tema-tema tertentu. Biasanya diadakan di gedung akan tetapi semenjak Pandemi Covid 19 kegiatan lebih banyak dilakukan secara online melalui media zoom.

“..... kegiatan kita masih aktif pak. Tapi tidak seperti dulu lagi pak. Biasanya kita mengundang tokoh-tokoh di gedung dengan pemateri ustadz kita dari Jakarta. Tapi sekarang susah untuk seperti itu karena ada Covid 19. Makanya kita lebih banyak nge-Zoom seminarnya pak..... (Hasil wawancara dengan RD,

aktivis mahasiswa eks HTI, 17/08/2021.

Kapitalisme sebagai sistem yang diterapkan saat ini, sejatinya sistem buatan manusia yang rapuh dan kontraproduktif. Sistem yang berlandaskan azas sekulerisme ini menjadikan manusia sebagai pembuat sekaligus pelaksana aturan. Kebijakan yang sering kali mengecewakan masyarakat, seolah menegaskan bahwa kebijakan yang dibuat memang di tanggungi banyak kepentingan. Misalnya saja kepentingan bisnis sector kesehatan seperti vaksinasi. Padahal, vaksinasi sedang berlomba dengan menjalarnya viruske tengah masyarakat. Namun hegemoni negara-negara maju penghasil vaksin mebuat distribusi vaksin pada negara berkembang tersendat.

Sedangkan muhasabah lil hukkam, mengkoreksi penguasa yang lalai, salah dan keliru, termasuk perkara yang umum dari agaa ini. Salah satu hadis yang mendorong untuk mengkoreksi penguasa, menasehati mereka, adalah hadist dari *tamim al dari radhiyaiahu'anhu*, bahwa nabi Muhammad *shallahu'alayhi wa sallam* bersabda (agama itu adalah nasehat).

Maka mahasiwa sebagai *leader of change* harus melakukan amar makruf nahi mungkar secara terang-terangan, dan tidak boleh disembunyikan. Ini adalah pendapat mu'tabar dan perilaku generasi salaguna al shalih. Namun, sebagian orang berpendapat bahwa menasehati seorang penguasa haruslah dengan cara sembunyi-sembunyi (emapat mata).

Menurut mereka, seorang muslim dilarang menasehati penguasa secara terang-terangan di depan umum, mengungkap kesalahan mereka di muka public, karena ada dalil yang menghkususkan. Pendapat semcam ini adalah pendapat

batil, dan bertentangan dengan realitas muhasabah lil kukkam yang dilakukan oleh nabi *shallaliahu alaihi wa sallam*, para sahabat dan generasi-generasi *al salaf al shalih* sesudah mereka.

Apa yang harus kita lakukan yang kita menjunjung tinggi ediologi Harus membuat Perubahan revolusi. Kedaktoran berjalan jangan sampai mati. Rezim yang dekator rezim yang di kasih menderita. Sengaja di kasih hidup untuk melayanani rezim dengan berbagai macam bantuan. Ini lah yang mendorong kita untuk membuat suatu perubahan dengan menjunjung tinggi ediologi.

Bagaimana islam memberikan solusi tata kelola yang baik dan pemimpin yang bersih. Ada 2 perosanal dari pemerintah dan secara sistemik. Bagamina sistem itu d laksanakan, Karena itu islam sudah menggariskan untuk menghasilkan yang namanya tata kelola yang baik dan seorang pemimpin yang bersih. Sekarang ini kita rusak dari segi teknis dan metode. Buktinya sekarang dari sistem demokrasi jelas rusak. Seseorang yang mengemban tugas bukan karena dia bisa. Tetapi Rezim yang dipilih karena dekat. Orang saya maka dari itu haus di tunjuk. Sistem poltik sekarang sistem poltik dagang sapi atau poltik transional dimana ada timbale baik antar yang satu dengan yang lain. Solusinya dalam islam harus mengatasi krisis tata kelola pemerintah. Bagaimana peran ediologi mengatasi permasalahan tersebut. ketika islam memeberikan amanah posisi kalifah Yang memiliki syarat-syarat.

Menurut ustad M.Y Dalam konteks kehidupan sosial kegagalan yang terjadi adalah tentang kemiskinan, lebih dari setengah pendduk di negeri ini itu dalam k miskinanan. Ini menunjukan gejala sosial bentul-betul kita rasakan baik

dari daerah dan skala nasional. Dengan negara yang kekayaan alamnya bagus justru masyarakatnya berada dalam kemiskinan. Masyarakat adalah sekelompok individu yang diatur dengan kelompok yang sama. Salah satu masyarakat tidak itu tidak terpenuhi. Salah satunya aturan yang sangat mementingkan kepentingan penguasa. Kita bisa melihat bagaimana masyarakat butuh dalam memenuhi kebutuhan hidup di tengah pandemi. Bantuan yang seharusnya malah dikorupsikan. Pemerintah tidak hadir dalam memberikan bantuan dalam kehidupan masyarakat. Solusinya adalah kembali ke sistem Islam yang benar yang sesuai fitra manusia yang kemudian memberikan ketenangan jiwa yang betul-betul memuaskan akal. 72 tahun Indonesia merdeka tapi negara belum bisa mengatasi kemiskinan bahkan hutang negara yang lumayan besar. Di Kota Bengkulu yang mayoritas Islam masih banyak yang terjebak sama hutang riba.

Para mahasiswa mari kembali ke sistem Islam. Perubahan ini harus diambil dampak ketika Islam menyerukan perubahan yang kemudian secara individu. Ketika kita mengambil Islam sebagai jembatan bagi kita, sebagai alat sebagai kehidupan sosial yang memberikan manfaat bagi kehidupan. Yang bisa diterapkan hukum Islam yaitu Islam Khalifah Islami. Dalam membangun perubahan perubahan dakwah yang direstui oleh Allah SWT. Kebijakan publik termasuk sektor pendidikan dipengaruhi oleh ideologi yang menganut kapitalisme sekuler, dan ideologi komunis Islam. Komunis yang menihilkan Tuhan dan kapitalis sekuler yaitu mengkerdikan Tuhan. Inilah yang terjadi di negara kita saat ini. Faktanya menghilangkan mata pelajaran agama di sekolah. Sekuler sangat kenatal di dunia pendidikan. Jalan pendidikan nasional sudah menghilangkan pendidikan

nasional dalam visinya sudah mengilangkan prasa agama.



Gambar 4.2

Dari gambar di atas merupakan gambaran tentang isi dakwah melalui media online membahas kajian tentang *The And Of Secular Capitalism*. Dari kajian ini bisa kita lihat bahwa existensi anggota eks HTI masih di jalankan berdasarkan edilogi mereka.

Informasi yang sama juga diberikan oleh seorang tokoh eks anggota komunitas Masyarakat Tanpa Riba (MTR) Bapak KW. Sejak awal beliau sangat tertarik untuk bergabung dengan komunitas MTR karena memang dakwah yang mereka lakukan sangat membantu permasalahan masyarakat khususnya orang-orang yang terbelit hutang dengan Bank konvensional. Selain mengkampanyekan anti riba, mereka juga siap melakukan pendampingan bagi masyarakat yang ingin memutus pembayaran riba pada Bank. Namun pada akhirnya ia melihat bahwa komunitas tersebut mayoritas diisi oleh Eks HTI yang perlahan-lahan tetap mempromosikan ideologi eks HTI bagi setiap anggota pada kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Hal tersebut membuat bapak KW mundur sebagai anggota dan

mendirikan komunitas sejenis juga.

Gambar di bawah ini memperkuat data peneliti atas pernyataan di atas dimana salah satu anggota HTI yang dulu aktif mundur lalu mendirikan komunitas lain.



Gambar 4.3

“.....Komunitas MTR ini sangat bagus menurut saya, karena programnya benar-benar mempraktekkan sistem Islam, khususnya dalam bidang ekonomi. Jadi pengurus MTR ingin mengajak anggota dan masyarakat secara umum untuk anti terhadap riba dengan cara tidak berhutang dengan Bank. Kalaupun sudah terlanjur berhutang, mereka siap untuk membimbing agar terbebas dari riba. Itu yang membuat saya bergabung. Namun semakin kesini saya melihat, ada ideologi eks HTI yang ikut dikampanyekan seperti Khilafah dan lain-lain. Maka saya memutuskan untuk keluar dari komunitas, dan saya mendirikan komunitas baru dengan teman-teman yang lain. (Hasil wawancara dengan bapak KW, eks anggota MTR, tanggal 12/06/21

Selain dengan eks anggota HTI, peneliti juga menghimpun informasi dari pihak-pihak non eks HTI yang menjadi informan penelitian kami. Salah satunya misalnya dari pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Bengkulu. Menurutnya setelah HTI dibubarkan tidak serta merta akan menghapuskan ideologi HTI (Khilafah) dalam pemikiran para eks anggotanya. Karena HTI sudah lama berdiri dan melakukan aktivitas dakwah di Indonesia. Kalaupun sekarang ormas HTI dibubarkan, itu hanya membubarkan lembaganya saja, namun belum

tentu dapat menghapuskan ideologinya. Dalam kondisi ini tentu para eks HTI akan mencari cara bagaimana untuk dapat bertahan ditengah ancaman yang dapat membahayakan eksistensi ideology mereka.

“...Yang dibubarkan pemerintah itu organisasinya kan, tapi belum tentu ideologinya. Saya kira agak sulit untuk menghapuskan ideologi pada pikiran penganutnya. Meskipun HTI resmi dibubarkan, mungkin para pengikut eks HTI masih bisa melanjutkan dakwahnya. Hanya saja pasti dengan wajah baru. Mereka lebih tau bagaimana untuk aman dalam menjalankan misi dakwahnya. Hasil wawancara dengan bapak RH, MUI Provinsi Bengkulu, 15/09/21.

Namun, pimpinan MUI tersebut juga menyampaikan penilaiannya terhadap eks ormas HTI bahwa secara umum ajaran dan dakwahnya tidak menyimpang dari ajaran Islam (Al-qur'an dan As Sunnah). Bahkan gerakan dakwah mereka sangat bermanfaat dalam mengajak masyarakat untuk berIslam secara baik. Hanya saja jargon “khilafah” yang mereka kampanyekan itu dianggap banyak pihak berpotensi memecah belah anak bangsa yang pada akhirnya akan mengganti ideologi Pancasila di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“.....Terlepas masalah pembubaran eks HTI oleh pemerintah, dakwah HTI ada baiknya untuk mengajak ummat pada kebaikan. Anak muda diajak berhijrah, menutup aurat. Orang diajak sholat dan sebagainya. Namun, pola dakwah HTI yang sering berseberangan dengan pemerintah dengan membawa simbol-simbol khilafah berdampak negatif. Mereka dinilai ingin menukar NKRI dengan Negara Islam. (Hasil wawancara dengan bapak RH, MUI Provinsi Bengkulu, 15/09/21



Gambar 4.4

Selanjutnya, peneliti juga melakukan observasi di dunia maya, diantaranya mengamati dakwah eks HTI di media sosial baik di akun Facebook, Instagram maupun WA Grup eks anggota yang sudah peneliti kenal. Hasilnya tim peneliti menemukan masih banyak kegiatan yang mereka lakukan melalui virtual, khususnya media zoom yang dikampanyekan melalui poster-poster di akun medsos nya. Secara garis besar, kegiatan yang mereka lakukan dibagi secara dua tema besar. Pertama mengedukasi masyarakat kepada sistem Islam secara kaffah (sempurna), Kedua diskusi publik yang mengkritik kebijakan pemerintah saat ini.

b. Pola Gerakan Sosial HTI Pasca Pembubaran

Pada sub bab diatas telah diuraikan tentang eksistensinya ideologi eks HTI di Provinsi Bengkulu. Maka pada sub bab ini peneliti akan menguraikan hasil wawancara dan observasi terkait bagaimana pola-pola gerakan sosial yang terjadi pada eks HTI di Bengkulu. Apakah memiliki kesamaan dengan pola eks HTI di wilayah lain atau tidak. Berikut ini peneliti uraikan data lapangannya.

Dari hasil wawawancara terhadap informan, pengumpulan dokumen serta pengamatan di masyarakat, dapat dilihat bahwa pola gerakan sosial eks HTI di Bengkulu yaitu : (1) Mereka melakukan gerakan dengan pola elastis tanpa mengambil gerakan konfrontatif secara langsung. (2) Gerakan perlawanan disuarakan lebih kepada dialog intelektual, kritis terhadap kebijakan pemerintah maupun melalui kegiatan seminar secara virtual tanpa melakukan kegiatan demonstrasi massa seperti dahulu.

Sejak pemerintah resmi membubarkan dan melarang seluruh aktifitas dakwah HTI di Indonesia, maka para eks HTI mencari cara lain untuk berdakwah yang dianggap lebih aman dari pantauan rezim pemerintah. Para pimpinan eks HTI telah menyadari bahwa kondisi Indonesia saat ini tidak aman bagi komunitas mereka. Oleh karena itu mereka lebih memilih melakukan kegiatan yang lebih soft dengan berbagai penyesuaian pada situasi dan kondisi dibanding melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat konfrontatif terbuka seperti demo secara besar-besaran. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh salah satu eks HTI yang peneliti wawancarai.

Hal ini di perjelas dengan hasil wawancara dengan salah satu informan yang peneliti wawancarai.

“....kami sadar bahwa rezim saat ini kurang bersahabat dengan ummat Islam. Sehingga sejak dibubarkan oleh pemerintah, kami tidak lagi melakukan aksi demonstrasi dijalanan, karena akan semakin merugikan kita sendiri. Itu juga yang menjadi arahan pimpinan pusat....” (wawancara Ust. IL, anggota aktif eks HTI) 17/09/21

“.....sejak kita dibubarkan oleh pemerintah, kita tetap mengadakan kegiatan-kegiatan dakwah dengan menggunakan perahu (organisasi) baru. Kita mengadakan diskusi publik dengan mengundang tokoh-tokoh di daerah yang diisi pemateri dari pusat. Hanya saja sejak masa pandemi semua kegiatan kita lebih banyak secara virtual agar lebih aman....” (wawancara AR, Anggota aktif Eks

HTI Bengkulu), 22/09/21

Pasca pembubaran yang dilakukan oleh para eks HTI dengan Upaya yang mereka lakukan adalah dengan acara melakukan dakwah-dakwah islam, melakukan kelompo-kelompok pengajian (Qalako), Ligo atau kajian-kajian islam. Upaya dari anggota HTI dan ormas sejenis untuk mengganti kata HTI menjadi perahu kecilnya HTI.

Gerakan sosial yang di bentuk pasca pembubaran melalui jejaring Media Daring (Online). Di jaman sekarang tidak ada yang tidak terhubung dengan internet. Masyarakat pada dunia digital dan dianggap sebagai dunia tanpa batas, tidak sebatas melakukan interaksi dengan lingkungan sekitar, melainkan mampu melakukan komunikasi dengan teman bahkan rekan yang di luar negeri. Setiap individu hari ini secara intens mampu berinteraksi secara informal dan mengikuti serta menyaksikan berbagai kegiatan di seluruh dunia (Mahoney, dalam Firmanda dan Lalu 2018:6). Sebut saja YouTube sebagai sebuah media sosial (medsos) yang eksis dengan keberadaan internet yang sudah bisa mengases berbagai konten.

Meskipun secara hukum sudah di bubarkan, namun orang-orang HTI masih ada atau masih hidup. Di provinsi Bengkulu juga masih tetap eksis di tengah-tengah masyarakat Bengkulu. Dengan ke eksisannya melalui media jejaring (online).

“.....Aktifitas dakwah tetap berjalan dengan melalui media jejaring (online), melalui media Buletin dan media Umat wawancara dengan RD, tanggal 23/08/ 2021).

Hal tersebut di perkuat dengan hasil wawancara salah satu tokoh Muhammadiyah Kota Bengkulu Ustad Amal.

“.....mengenal HTI lewat media, Dakwah dengan menyosong hilafah. Yang membedakan dari organisasi lain adalah dengan menerapkan islam kaffah. Dari sejarahnya sudah ada islam hilafah ini sudah lama. Di indoensia kita sudah sepakat bahwa negara kita negara demokrasi”

Para eks HTI yang sekarang menjalankan Dakwah dengan pola-pola gerakan sosial yang cenderung isinya berdakwah. Yang menerapkan konsep dakwah al-quran dan Hadist, serta kita-kita ulama salafi.



Gambar: 4.5

Salah satu media Buletin Dakwah Kaffah yang berjudul “ketaatan total Syariah Allah” itu tertulis bahwa hari raya idul fitri dengan kondisi Indonesia yang tidak baik-baik saja. Dengan terjadinya fenomena yang ada di Indonesia seperti bencana alam, virus corona yang memakan korban jiwa. Pada saat itu memang kita tidak aman untuk keluar rumah. Menurut anggota mereka bahwa hal tersebut tidak ada solusinya dari pemerintah.

Salah satu hasil wawancara “beliau mengatakan Dengan begitu solusinya dengan cara islam kaffah. Ajaranya sesuai syariat islam berdasarkan al-quran dan hadist. Dengan menjalankan islam kaffah bisaa mengatur dunia menjadi lebih baik. Kebiajakn pemerintah Kertik suatu negara di anggap salah tapi tidak ada solusi. Poltik, ediologi pencucian otak adalah pencucian otak. Dalam rangka sosialisasi program HTI di juga melakukan pendekatan pada tokoh (tokoh lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat). Ustad menjelaskan seputar HTI dan dakwahnya di tengah-tengah masyarakat. Dalam kesempatan itu Hammam menegaskan bahwa jika Indonesia ingin maju dan sejahtera maka solusinya adalah terapkan syariah dan khilafah.

Sebagaimana dijelaskan oleh Suharko (dalam Putra, 2006:13), yang menyatakan tidak dapat dipungkiri bahwa strategi advokasi atau yang biasa disebut pendampingan merupakan strategi utama yang digunakan oleh kalangan NGO (*Non Government Organization*) baik di negara–negara maju maupun di negara-negara berkembang. Strategi advokasi seringkali digunakan untuk mendesakkan perubahan–perubahan sosial. Ketika dikombinasikan dengan kampanye media dan aliansi dengan donor asing, strategi ini membuat NGO bisa menjadi kekuatan pengubah kebijakan yang kuat, khususnya pada isu-isu di mana mereka punya banyak pengalaman. Akan tetapi, ketika masyarakat enggan turun ke jalan untuk bergabung dalam demonstrasi dan protes masa, maka NGO yang mempunyai basis keanggotaan besar dan jaringan yang luas seringkali berusaha membangun protes dengan menyebarkan surat dan pernyataan resmi kepada publik, pemerintah maupun agen internasional.

Sebagai sebuah ormas, meskipun sudah dicabut status hukumnya, bukan berarti HTI tidak bisa tetap eksis di Indonesia. HTI tetap bisa melakukan dakwah meskipun memang dakwah yang akan dilakukan akan diawasi secara ketat oleh pemerintah. Kemungkinan terjelek dari kasus hukum HTI, yang sekarang ini sedang menunggu sidang banding dari kasasi yang diajukannya ke MA, HTI bisa menjadi sebuah organisasi tanpa bentuk (OTB). Keberadaan OTB di Indonesia diperbolehkan. Mereka juga diperbolehkan untuk beraktivitas meskipun dalam koridor-koridor hukum. Pemerintah sendiri sangat aktif dalam menyikapi eks HTI pasca dibubarkan sehingga tidak terjadi konflik di masyarakat. Tidak lama setelah dibubarkan pemerintah juga mengimbau para eks HTI untuk kembali ke NKRI dan kembali mengakui Pancasila sebagai dasar negara dan UUD 1945 sebagai landasan hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemerintah juga menerbitkan surat keputusan bersama (SKB) 3 Menteri untuk mencegah terjadinya persekusi atau tindakan sewenang-wenang terhadap bekas anggota dan simpatisan HTI. Sebagaimana dinyatakan oleh Menkopolkum Wiranto, SKB 3 Menteri dibuat sebagai dasar pembinaan negara kepada para eks anggota HTI agar meninggalkan ideologi khilafah yang diusungnya. Adanya SKB tersebut dianggap tidak akan melarang eks HTI untuk berdakwah. Dakwah tetap boleh dilakukan asal tidak menyebarkan ajaran yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Suharko (Putra, 2006:11) menyatakan begitu banyak strategi atau taktik gerakan sosial yang bisa dipakai untuk mencapai tujuan-tujuan gerakan sosial. Pemilihan strategi tersebut berdasarkan atas pengamatan terhadap konteks atau

setting politik tertentu, pertimbangan pihak lawan yang dihadapi, isu yang dibidik, dan kekuatan serta sumberdaya yang dimiliki oleh organisasi gerakan sosial tersebut. Model dan pilihan inilah yang harus dikembangkan ditingkat praktis supaya aksi dari gerakan sosial tersebut sesuai dengan harapan.

HTI melalui forum-forum public, seperti seminar, diskusi, talkshow, tabligh akbar, pengajian-pengajian dan lain sebagainya yang dilakukan di wilayah provinsi Bengkulu. Yang dilakukan dalam waktu yang cukup lama.



Gambar 4.6

Tim peneliti juga diutus untuk mengikuti kegiatan webinar yang dilakukan oleh komunitas eks HTI. Kegiatan tersebut bertemakan Hijrah yang diisi oleh Pembicara nasional salah satu ustadz muda Eks HTI yakni Felix Siaw. Dari kegiatan webinar tersebut, para pemateri menyampaikan materi urgensi dan keutamaan bagi orang yang berhijrah. Memang tidak didapatkan ajakan ataupun arahan yang mengarah kepada ideologi eks HTI.

“Pandemi membawa hijrah masuk islam, ketika ia berapasan dengan salah satu orang silam. Ia merasa ingin mengetahui, bahwa pada saat itu ia melihat bahwa wanita sama laki-laki tidak boleh bersalaman yang bukan mahrom. Karena hal tersebut bertentangan dengan islam kaffah”kajian online(Carissa: 11-8-2021).

Berdasarkan kajian di atas bahwa yang dilakukan oleh komunitas dengan pola yang yang di pakai untuk menghasilkan sesuatu atau bagian dari sesuatu contoh dalam fenomena yang terjadi belakangan ini. Mereka merpikir bahwa solusi itu yang berdasarkan islam kaffat tersebut. dengan perubahan setiap masalah orang akan menjadi lebih tenang.

Namun secara tradisonal bahwa kita tidak bisa menyongsong ke kehedupan ke depan. Dimana kita beda zaman, masyarakat hidup di genrasi mana. Ketika kita sharus mengikuti jejak Nabi Muhammad dengan pemerintahan sekarang jelas sudah berbedah.

Salah satu wawancara dengan Nadatul ulama kab. Kaur Bengkulu selatan bapak Sidarmin melalui wawancara tersebut beliau mengatakan “ Yang diketahui tentang HTI yang merupakan oramas yang beroganisasi yang Keliru dengan cara berpikir mereka.

Terkadang juga Membuat berpikir anarkis karena menolak pancasila. Artinya menolak dimanika kebersamaan yang telah di bangun di indonesia. Sacara action tidak begitu membuat aksi karena dalam menjalankan islam tetap seperti biasa. Sepakat dalam pembuaran hti dalam konteks yang sekarang karena saat ini dengan kita negara islam terbesar menjamin kelanggengan dalam hidup bersama. Berharap kita berpikir mengarah ke disentrgrasi berbangsa apa lagi dengan acara memecah belah.

c. Tahap-Tahap Gerakan Social eks HTI DI Bengkulu PascaPembubaran

Dari hasil wawanwacara terhadap informan, pengumpulan dokumen serta pengamatan di masyarakat, dapat dilihat bahwa tahapan gerakan sosial eks HTI di Bengkulu yaitu Langkah pertama yang dilakukan eks HTI setelah dibubarkan oleh pemerintah adalah membentuk wadah baru sebagai pengganti wadah lama. Bahkan mereka mendirikan komunitas-komunitas baru dengan beragam lingkup :

1. Mereka mendirikan komunitas-komunitas baru dengan beragam lingkup.

Ada komunitas “MTR” (Masyarakat Tanpa Riba) yang bergerak pada penyadaran ummat tentang bahaya utang dan bunga Bank. Ada komunitas “Indonesia Tanpa Pacaran” yang bergerak kepada penyadaran pemuda untuk hijrah dari sikap-sikap hedonisme. Ada komunitas “Bengkulu Rindu Islam” yang bergerak kepada isu-isu kebangsaan termasuk kritik kebijakan pemerintah. ada komunitas “BKLDK’ sebagai organisasi kemahasiswaan menaungi kampus-kampus sebagai ganti dari Organisasi “Gema Pembebasan” underbow HTI dulunya.

2. Tahap Berikutnya adalah melakukan penyadaran kepada ummat dengan menyebarkan ide-ide pemikiran melalui kegiatan seminar-seminar, pelatihan, dialog, majalah/Buletin
3. Proses Perekrutan anggota. Bagi peserta kegiatan yang memiliki potensi, maka mereka akan diajak untuk melakukan kegiatan yang lebih intensif dengan jumlah peserta terbatas, untuk mengkaji sistem Islam yang lebih komprehensi.

4. Mengurus Negara. Memang saat ini eks HTI masih belum mau terlibat dalam politik pemerintahan karena mereka menganggap pemerintah saat ini belum menjalankan sistem Islam dengan Baik. Tapi mereka meyakini jika suatu saat nanti SDM mereka sudah siap, mereka siap menguasai lini-lini pemerintahan untuk menjalankan sistem Islam dengan baik agar Indonesia lebih maju.

“....kami menilai masih banyak sekali sistem di negara kita yang tidak sesuai dengan sistem Islam. Termasuk masalah riba di Bank. Baik bank syariah atau bank konvensional masih sama-sama menggunakan riba menurut kami.Termasuk masalah pandemi, kami tidak ikut untuk vaksin yang dianjurkan pemerintah..” (Wawancara Ust Il, anggota aktif eks HTI), 17/09/21

- “..... kami tetap menolak untuk terlibat dalam politik demokrasi, sampai sekarang anggota kami masih mayoritas golput saat Pilkada. Kalo memang anggota kita sudah siap untuk mengurus negara, baru kita perbaiki sistem yang ada..... (wawancara dengan AR, Anggota aktif Eks HTI) 22/09/21

HTI bukan merupakan sebuah organisasi islam biasa, melainkan sebuah partai politik.setelah di bubarkan para anggota HTI masih ada dengan membuat sebuah perahu kecil dengan nama lain. HTI salah satu ormas yang mengatasnamakan islam dengangaris-garis jelas yang mempunyai keinginan yang berbeda terhadap tujuan berbangsa dengan negara. Wawancara dengan para tokoh HTI – eks HTI karena sudah dicabut badan hukumnyadan simpatisansimpatisannya umumnya tidak secara tegas dan jujur mengaku HTI sebagai sebuah partai politik atau setidaknya gerakan politik. Mereka umumnya mempunyai

jawaban seragam bahwa HTI adalah murni organisasi dakwah. Sebagaimana diungkap oleh salah seorang eks anggota HTI.

“HTI merupakan oramas yang berorganisasi yang salah, karena mengandung unsur partai politik. Dakwah kegiatan terkait edilogi yang kajiannya tidak lepas dari pembahasan islam kaffah.” (wawancara dengan nara tanggal 21 Agustus 2021).

Hal senada juga diutarakan oleh ustad Adi, yang mendefinisikan HTI sebagai sebuah organisasi dakwah, atau lebih spesifik sebagai ormas Islam.

“Salah satu keluar dari HTI karena doktrn itu mulai masuk, karena doktrin itu berjalan. Doktrin kaffah sedikit radikal, karena yang ikut sepaham tidak harus di kafirkan” wawancara dengan ustad 25 juli 2021).

Dengan demikian HTI memang awalnya mengakui diri mereka sebagai sebuah gerakan dakwah namun di satu sisi juga mengakui bahwa gerakan dakwah yang mereka lakukan merupakan gerakan politik. Dan selama ini anggota HTI juga mengetahui bahwa HTI merupakan sebuah partai politik. Dakwah merupakan strategi HTI dalam rekrutmen dan pengkaderan anggotanya. Dengan strategi dakwah pun HTI mensyiarkan faham khilafah diantara anggota dan simpatisannya serta umat. Karena dengan strategi dakwah tersebut maka sangat sering HTI menyitir ayat-ayat Al-Quran dan Hadist Nabi Muhammad saw untuk pembenaran klaim mereka. Strategi dakwah ini juga memungkinkan HTI untuk mengidentikkan dirinya sebagai organisasi keIslaman, karenanya kemudian tidak heran di setiap kegiatan dakwahnya HTI membawa simbol-simbol agama seperti bendera, dan lain sebagainya.

Menurut salah satu anggota HTI yang masih aktif melakukan dakwah-dakwah islam melalui jejaring sosial seperti selalu mengeshere kegiatan dakwahnya melalui story WA bahwa tahapan yang mereka lakukan yaitu dengan membentuk kajian dan Penerbitan bulletin salah satu penerbitan al islam yang memiliki langkah-langkah, yakni *pertama*, untuk membuka wawasan dan membangun kesadaran umat islam untuk kembali merengkuh islam dalam aspek ruhiyah dan siyasiyah. Kedua, membantu memebrikan pemahaman dan kehihkalsan berkorban untuk kembali melanjutkan kehiudpan islam dalam naungan daulah khilafah al islamiyyah. Dengan dakwah dan penerbitan media menunjukan konstistensi HTI dalam memperjuangkan tegaknya Khilaffah dan menurut khilaffa merupakan satu-satu solusi dari berbagai macam persoalan di tengah-tengah kehidupan banyak terajdi ketidak adilan dalam bernegara.

Penelti juga mendapatkan jangkauan untuk ikut Streaming yang dijadikan sama jejaring HTI. Di mana hal tesebut membentuk kajian-kajian dengan cara bersosialisasi kilaffah dan sikap, solusi dengan gagasan yang ditawarkan oleh HTI tidak hanya dengan demonstrasi yang di hadiri oleh aktivis dan simpatisman yang jumlahnya ribuan, di tambah orasi atau pernyataan sikap yang di sampaikan oleh anggota HTI. Kajian intensif yang di kemas dalam bentuk halaqah atau liqok islam. Dengan berbagai media dan bentuk kajian akan menajdi tujuan mereka dalam menegakan islam dinegeri yang menajdi sasaran adalah orang-orang terdirik, misalnya mahasiswa, pelajar, dosen, guru dan para tokoh islam.

Metode yang di gunakan mereka dengan cara berdakwa melalui jejaring tersebut dengan cara yang lebih haus. Meskipun sudah di bubarkan di Bengkulu namun pola pikir mereka tentang islam kaffah itu masih ada.

Seperti dakwah kampus TV yang merupakan dakwah melalui jejaring sosial secara Daring yang membahas “ membicarakan isu strategis aspirasi suara aktifis. Dari komunis hingga pluralism mewaspadai pemikiran berujung penyimpangan.

2. Pembahasan dan Teoritis

Pembahasan dibagi menjadi 3 bagian sesuai dengan pertanyaan penelitian pada bab sebelumnya. Ketiga bagian tersebut adalah Eksistensi Gerakan Sosial HTI di Provinsi Bengkulu Pasca Pembubaran, Pola Gerakan Sosial Eks HTI di Bengkulu dan Tahapan Gerakan Sosial Eks HTI Bengkulu.

a. Eksistensi Gerakan Sosial HTI di Provinsi Bengkulu Pasca Pembubaran.

Pada saat ini, kita banyak menyaksikan fenomena gerakan sosial atau perlawanan yang semakin meluas di tingah-tengah masyarkat dalam upaya menentang dan mendorong perubahan kebijakan publik, perubahan politik dan sosial yang secara luas, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. Terjadi Perlawan semacam itu, bukan saja terjadi di negara-negara yang tergolong masih menerapkan sistem politik otoritarian, transisional, dan tingkat ekonomi bangsa yang masih terbelakang dan berkembang. Hal yang sama juga terjadi di negara-negara yang selama ini tergolong maju dan demokratis.

Gerakan sosial sejatinya tidak bisa dipisahkan dari sejarah perkembangan dunia, karena sebuah perubahan atau sebuah usaha untuk menghambat perubahan di dalam masyarakat merupakan bagian dari perkembangan sejarah gerakan sosial masyarakat. Markoff (2002:44) menyatakan bahwa suatu gerakan sosial dapat dikatakan terbuka apabila ada pernyataan yang secara eksplisit mengajak ke arah perubahan. Dengan Tujuan-tujuan dan nilai-nilai Dari gerakan ini secara esensial bersifat universal, yakni diarahkan untuk memberikan perlindungan dan mempertahankan kondisi kehidupan manusia ke arah yang lebih baik.

Sebuah gerakan eks HTI pasca pembubaran tentu melawati proses yang panjang yang pada akhirnya Langkah hukum HTI untuk menggugat pemerintah pasca dibubarkan tampaknya akan menempuh jalan terjal. Banding yang diajukan oleh HTI di tingkat Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) pun tetap ditolak, bahkan putusan PTUN menyatakan bahwa SK Kemenkumham yang mencabut status badan hukum HTI sudah sesuai prosedur. Putusan tersebut berdasarkan bukti bahwa HTI ternyata mengembangkan ajaran atau faham khilafah yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. HTI juga diyakini mengimplementasikan ajaran-ajaran khilafah tersebut dalam bentuk kegiatan-kegiatan dengan menyebarkan ajaran khilafah yang tujuan akhirnya mengganti Pancasila dan UUD 1945 serta mengubah NKRI menjadi negara khilafah Islamiyah.

Melalui wawancara beberapa para ormas islam, pemerintahan di kota Bengkulu Pasca pembubaran tidak ada aksi seperti demo. Dengan diam

karena dengan aksi demo akan membuat makin rusak. Fakta-fakta penyalagunaan kekuasaan edilogi kapitalisme, dan komunisme, sosialisme saat ini. Orang-orang kapir dan orang munafik di posisi anti islam hanya kepentingan yang bersifat ekonomi. Meneurut Kurniawan pemrinth mengabaikan proses hukum dlam membubarkan Hazibut Tahrir Indonesia (HTI). Selain HTI di bubarkan ada juga di tahun 2020 pembubaran FPI. Dimana FPI resemi di larang beraktifitas di Indonesia.

Masyarakat merupakan sekumpulan individu yang dibentuk berdasarkan kesamaan pandangan, aturan, dan tujuan yang sama. Dalam perkembangan dinamika kehidupan masyarakat sering kali terdapat fenomena menarik yang muncul dimasyarakat, fenomena tersebut dikenal dengan istilah konflik sosial. Konflik sosial seringkali muncul akibat dari pertentangan atau pun perjuangan atas nilai-nilai dan klaim-klaim atas status, kekuasaan, dan sumber daya. (Harskamp, 1996:5).

Penyalagunaan kekuasaan jug terjadi korupsi yang kasusnya dana bansus Covid-19. Itu adalah mengambil hak rakyat yang cukup besar. Tentang demokrasi korupsi “wakil ketua komisi I DPD RI dan Fahira Idris tentang apapun demokrasi, pasti selalu ada potensi peraktek penyalagunaan kekuasaan dan kebijakan yang tidak adil.

Di provinsi Bengkulu Alurnya setelah perahu besar (HTI) di bubarkan mulai di bentuk dengan yang nama nya MTR, BKLDK, Bengkulu Beriman, dan dakwah kampus TV. Selain, membentuk sebuah organisasi kecil. Kegiatan tersebut juga melakukan seminar dalam satu

tahun sekali. Di Bengkulu termasuk masyarakat yang punya banyak hutang. Untuk menyadarkan hutang agar ribah dan harus melunasi hutang dengan berdakwah berdasarkan Hadis dan Sunah. Salah satu yang dilakukan para anggota HTI yang dulu aktif berdakwah secara terang-terangan. Namun, pada saat ini dengan cara diam-diam dalam menyeruhkan konsep Neraka Islam. Dan HTI masih tetap eksis di Kota Bengkulu dengan cara berdakwah melalui jejaring media sosial.

Menurut Abdul Wahid Situmorang (Tarrow, 1998: 13), gerakan sosial adalah tantangan kolektif yang diajukan sejumlah orang yang memiliki tujuan dan solidaritas yang sama, dalam konteks interaksi yang berkelanjutan dengan kelompok elite, lawan, dan penguasa. Tarrow menambahkan, dalam gerakan terdapat lima aspek penting yang terangkum pada setiap gerakan sosial. Kelima aspek tersebut antara lain: (a) Setiap gerakan sosial terdapat penekanan pada gerakan-gerakan, (b) Menyusun aksi mengacau (*disruptive*) melawan kelompok elite, dan aturan-aturan budaya tertentu, (c) Dilakukan atas nama tuntutan yang sama terhadap lawan, penguasa dan kelompok elite, (d) Berasal pada rasa solidaritas atau identitas kolektif, dan (e) Terus melanjutkan aksi kolektifnya sampai menjadi sebuah gerakan sosial. Dengan demikian secara garis besar gerakan sosial diikuti oleh sejumlah individu yang memiliki tujuan dan identitas kolektif yang sama yang secara bersama-sama terlibat dalam aksi kolektif yang bertujuan mengacau. (Bert, 2005: 12).

Meihat fenomena sekarang ini membuat Dunia mahasiswa kembali resah atas kebijakan pemerintah akhir-akhir ini. Sebab, ini bukan pertama kalinya melainkan yang sekian kalinya kebijakan pemerintah selalu merugikan rakyat Indonesia. Dengan penyalagunaan kekuasaan . HTI pada saat di bubarkandi bubarakan para anggota eks HTI yang di katakan inforaman anggota HTI yang dulu aktif di organisasi tersebut. di kota Bengkulu HTI tetap Eksis di tengah-tengah masyarakat dengan melakukan gerakan-gerakan baru. Karena berdasarkan informan eks di Bengkulu mereka tetap menjalankan aktifitas dakwah seperti biasa. Melihat fenomena yang makin tidak terarah dari segi bidang ekonomi, poltik, pendidikan dan sosial budaya yang semakin teidak terarah. Contoh di bidang ekonomi masyarakat kota Bengkulu masih banyak yang terjerat hutang.

Maka perlawanan yang mereka jalankan dengan pemikiran eks HTI membrikan solusi dengan membentuk komunitas baru atau istilahnya perahu kecil. Tetap menjalankan aktifitas dakwah nya Mempaparkan penjajahan yang masih mecerkram di neregri ini, dengan sdm yang masih d kuasi oleh asing. Kemudian beliau memberikan solusi yang sebenar-benarnya menyelesaikan permasalahan umat saat ini adalah dengan kembali pada islam.

Aktivitas intelektual HTI menemukan ekspresinya lewat seminar dan publikasi. Ini tentu saja merupakan strategi untuk menyebarkan ide-ide HTI dan menarik dukungan dari segmen terdidik dari masyarakat

Indonesia. Seminar aktif dilaksanakan mulai dari media online, seperti wa, yotube dan pertemuan seminar di lakukan di Hotel.

Dalam hal ini, ada sebuah kelompok masyarakat (ormas HTI) secara sepihak telah dibubarkan oleh rezim pemerintah tanpa melalui proses pengadilan yang objektif. Sebagai pihak yang dirugikan oleh kebijakan pemerintah, maka peneliti ingin melihat bagaimana bentuk serta dinamika perjuangan yang dilakukan oleh eks HTI dalam memperjuangkan agenda politiknya di NKRI.

Salah satu penyebab gerakan sosial adalah framing (pembingkai). Framing dapat kita pahami sebagai suatu bentuk cara pandang individu terhadap fenomena yang dipengaruhi oleh ideologi di dalam dirinya. Dengan kata lain, frame menentukan sikap individu terhadap suatu fenomena. Frame dalam gerakan sosial adalah skema interpretasi yang memberikan kemampuan individu untuk mengidentifikasi suatu fenomena yang sedang terjadi di sekitarnya. Framing dalam gerakan sosial lebih dapat dianggap sebagai cara atau strategi yang digunakan untuk menyamakan pandangan baik dari pelaku maupun dari masyarakat terhadap suatu isu tertentu (Tarrow : 1998). Menurut Tarrow (1998), framing bertujuan untuk menjustifikasi, memuliakan, dan mendorong aksi kolektif. Dengan terus melanjutkan gerakan baru yang secara diam-diam mereka terus melakukan gerakan-gerakan yang yang dapat memberikan solusi di kehidupan kini.

b. Pola Gerakan Sosial HTI Pasca Pembubaran

Selain itu, gerakan sosial juga memiliki komponen-komponen didalamnya. Suatu gerakan sosial dapat dikatakan sebagai sebuah interseksi dari adanya unsur-unsur yang ada pada fenomena sosial. Unsur yang dimaksud memiliki berbagai macam bentuk, seperti aksi sukarela, asosiasi sukarela, professionalized reform, kepentingan kelompok, kebijakan sosial, negara, partai politik, perubahan sosial, media massa, discourse & ideology, opini public, perilaku kolektif dan aksiindividu.

Pasca pembubaran yang dilakukan oleh para eks HTI dengan Upaya yang mereka lakukan adalah dengan acara melakukan dakwah-dakwah islam, melakukan kelompo-kelompok pengajian (Qalako), Ligo atau kajian-kajian islam. Upaya dari anggota HTI dan ormas sejenis untuk mengganti kata HTI menjadi sebuah gerakan baru yang punya pola yang baru.

Pola gerakan sosial yang di bentuk pasca pembubaran melalui jejaring Media Daring (Online). Di jaman sekarang tidak ada yang tidak terhubung dengan internet. Masyarakat pada dunia digital dan dianggap sebagai dunia tanpa batas, tidak sebatas melakukan interaksi dengan lingkungan sekitar, melainkan mampu melakukan komunikasi dengan teman bahkan rekan yang di luar negeri. Setiap individu hari ini secara intens mampu berinteraksi secara informal dan mengikuti serta menyaksikan berbagai kegiatan di seluruh dunia (Mahoney, dalam Firmanda dan Lalu 2018:6). Sebut saja YouTube sebagai sebuah media sosial (medsos) yang eksis dengan keberadaan internet yang sudah bisa mengases berbagai konten.

Meskipun secara hukum sudah di bubarkan, namun orang-orang HTI masih ada atau masih hidup. Di provinsi Bengkulu juga masih tetap eksis di tengah-tengah masyarakat Bengkulu. Dengan ke eksisannya melalui media jejaring (online).

“Aktifitas dakwah tetap berjalan dengan melalui media jejaring (online), melalui media Buletin dan media Umat wawancara dengan Redho, tanggal 23 Agustus 2021).

Hal tersebut di perkuat dengan hasil wawancara salah satu tokoh Muhammadiyah Kota Bengkulu Ustad Amal.

“mengenal HTI lewat media, Dakwah dengan menyosong hilafah. Yang membedakan dari organisasi lain adalah dengan menerapkan islam kaffah. Dari sejarahnya sudah ada islam hilafah ini sudah lama. Di Indonesia kita sudah sepakat bahwa negara kita negara demokrasi”

Para eks HTI yang sekarang menjalankan Dakwah dengan pola-pola gerakan sosial yang cenderung isinya berdakwah. Yang menerapkan konsep dakwah al-quran dan Hadist, serta kita-kita ulama salafi.



Gambar: 4.7

Salah satu media Buletin Dakwah Kaffah yang berjudul “ketaatan total Syariah Allah” itu tertulis bahwa hari raya idul fitri dengan kondisi Indonesia yang tidak baik-baik saja. Dengan terjadinya fenomena yang ada di Indonesia seperti bencana alam, virus corona yang memakan korban jiwa. Pada saat itu memang kita tidak aman untuk keluar rumah. Menurut anggota mereka bahwa hal tersebut tidak ada solusinya dari pemerintah.

Salah satu hasil wawancara “beliau mengatakan Dengan begitu solusinya dengan cara Islam Kaffah. Ajarannya sesuai syariat Islam berdasarkan Al-Quran dan Hadist. Dengan menjalankan Islam Kaffah bisa mengatur dunia menjadi lebih baik. Kebijakan pemerintah seperti suatu negara dianggap salah tapi tidak ada solusi. Politik, ideologi pencucian otak adalah pencucian otak. Dalam rangka sosialisasi program HTI di juga melakukan pendekatan pada tokoh (tokoh lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat). Ustad menjelaskan seputar HTI dan dakwahnya di tengah-tengah masyarakat. Dalam kesempatan itu Hammam menegaskan bahwa jika Indonesia ingin maju dan sejahtera maka solusinya adalah terapkan syariah dan khilafah.

c. Tahap-Tahap gerakan social eks HTI DI Bengkulu Pasca Pembubaran

Masyarakat pada dunia digital dan dianggap sebagai dunia tanpa batas, tidak sebatas melakukan interaksi dengan lingkungan sekitar, melainkan mampu melakukan komunikasi dengan teman bahkan rekan yang di luar negeri. Setiap individu hari ini secara intens mampu

berinteraksi secara informal dan mengikuti serta menyaksikan berbagai kegiatan di seluruh dunia (Mahoney, dalam Firmanda dan Lalu 2018:6).

HTI bukan merupakan sebuah organisasi islam biasa, melainkan sebuah partai politik. Setelah di bubarkan para anggota HTI masih ada dengan membuat sebuah perahu kecil dengan nama lain. HTI salah satu ormas yang mengatas namakan islam dengan garis-garis jelas yang mempunyai keinginan yang berbeda terhadap tujuan berbangsa dengan negara. Wawancara dengan para tokoh HTI – eks HTI karena sudah dicabut badan hukumnya dan simpatisan simpatisannya umumnya tidak secara tegas dan jujur mengaku HTI sebagai sebuah partai politik atau setidaknya gerakan politik. Mereka umumnya mempunyai jawaban seragam bahwa HTI adalah murni organisasi dakwah. Sebagaimana diungkap oleh salah seorang eks anggota HTI.

“.....HTI merupakan oramas yang berorganisasi yang salah, karena mengandung unsur partai politik. Dakwah kegiatan terkait ideologi yang kajiannya tidak lepas dari pembahasan islam kaffah.” (wawancara dengan N tanggal 21 Agustus 2021).

Hal senada juga diutarakan oleh ustad Adi, yang mendefinisikan HTI sebagai sebuah organisasi dakwah, atau lebih spesifik sebagai ormas Islam.

“...Salah satu keluar dari HTI karena doktrin itu mulai masuk, karena doktrin itu berjalan. Doktrin kaffah sedikit radikal, karena yang ikut sepaham tidak harus di kafirkan” wawancara dengan ustad A 25 juli 2021).

Dengan demikian HTI memang awalnya mengakui diri mereka sebagai sebuah gerakan dakwah namun di satu sisi juga mengakui bahwa

gerakan dakwah yang mereka lakukan merupakan gerakan politik. Dan selama ini anggota HTI juga mengetahui bahwa HTI merupakan sebuah partai politik. Dakwah merupakan strategi HTI dalam rekrutmen dan pengkaderan anggotanya. Dengan strategi dakwah pun HTI mensyiarkan faham khilafah diantara anggota dan simpatisannya serta umat. Karena dengan strategi dakwah tersebut maka sangat sering HTI menyitir ayat-ayat Al-Quran dan Hadist Nabi Muhammad saw untuk pembenaran klaim mereka. Strategi dakwah ini juga memungkinkan HTI untuk mengidentikkan dirinya sebagai organisasi keIslaman, karenanya kemudian tidak heran di setiap kegiatan dakwahnya HTI membawa simbol-simbol agama seperti bendera, dan lain sebagainya.

Berkembang pesatnya situs jejaring sosial tersebut tentu saja punya dampak positif dan juga negatif, oleh karena itu penting untuk dibuat suatu sistem pengawasan dan bimbingan bagi mereka agar dampak negatifnya dapat dihindari dan dampak positifnya semakin di rasakan. Dari teori tersebut dapat dilihat bahwa setiap gerakan sosial terdapat perubahan. Untuk melihat setiap perubahan tersebut kita bisa menganalisis fenomena yang terjadi di masyarakat apakah tujuannya ke arah lebih baik atau malah sebaliknya.

Menurut salah satu anggota HTI yang masih aktif melakukan dakwah-dakwah islam melalui jejaring sosial seperti selalu mengeshera kegiatan dakwahnya melalui story WA bahwa tahapan yang mereka lakukan yaitu dengan membentuk kajian dan Penerbitan bulletin salah satu

penerbitan al islam yang memiliki langkah-langkah, yakni *pertama*, untuk membuka wawasan dan membangun kesadaran umat islam untuk kembali merengkuh islam dalam aspek ruhiyah dan siyasiyah. Kedua, membantu memebrikan pemahaman dan kehihkalsan berkorban untuk kembali melanjutkan kehidupan islam dalam naungan daulah khilafah al islamiyyah. Dengan dakwah dan penerbitan media menunjukan konstistensi HTI dalam memperjuangkan tegaknya Khilaffah dan menurut khilaffa merupakan satu-satu solusi dari berbagai macam persoalan di tengah-tengah kehidupan banyak terjadi ketidakadilan dalam bernegara.

Peneliti juga mendapatkan jangkauan untuk ikut Streaming yang dijadikan sama jejaring HTI. Di mana hal tersebut membentuk kajian-kajian dengan cara bersosialisasi khalifah dan sikap, solusi dengan gagasan yang ditawarkan oleh HTI tidak hanya dengan demonstrasi yang dihadiri oleh aktivis dan simpatisan yang jumlahnya ribuan, ditambah orasi atau pernyataan sikap yang disampaikan oleh anggota HTI. Kajian intensif yang dikemas dalam bentuk halaqah atau liqok islam. Dengan berbagai media dan bentuk kajian akan menjadi tujuan mereka dalam menegakan islam dinegeri yang menjadi sasaran adalah orang-orang terduduk, misalnya mahasiswa, pelajar, dosen, guru dan para tokoh islam.

Metode yang digunakan mereka dengan cara berdakwa melalui jejaring tersebut dengan cara yang lebih halus. Meskipun sudah dibubarkan di Bengkulu namun pola pikir mereka tentang islam khalifah itu masih ada.

Seperti dakwah kampus TV yang merupakan dakwah melalui jejaring sosial secara Daring yang membahas “ membincangkan isu strategis aspirasi suara aktifis. Dari komunis hingga pluralism mewaspadaai pemikiran berujung penyimpangan.

Berkembang pesatnya situs jejaring sosial tersebut tentu saja punya dampak positif dan juga negatif, oleh karena itu penting untuk dibuat suatu sistem pengawasan dan bimbingan bagi mereka agar dampak negatifnya dapat dihindari dan dampak positifnya semakin di rasakan. Dari teori tersebut dapat dilihat bahwa setiap gerakan sosial terdapat perubahan. Untuk melihat setiap perubahan tersebut kita bisa menganalisis fenomena yang terjadi di masyarakat apakah tujuannya ke arah lebih baik atau malah sebaliknya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada subbab sebelumnya, dapat dikemukakan beberapa simpulan sebagai berikut:

- a. Sebelum dibubarkan para anggota HTI awal mulanya mereka berpartisipasi mereka mengikuti organisasi tersebut di training HTI, seminar dan halaqah karena diajak dan didorong oleh keluarga, senior dan perkawanan di antara mereka. Tegaknya khilafah di Indonesia merupakan tujuan utama HTI. Hal tersebut tidak terbantahkan. HTI selalu menyebut bahwa dakwah merupakan cara yang ditempuh oleh mereka untuk mewujudkan khilafah.

Pada awalnya kebanyakan mereka tidak mengetahui bahwa kegiatan tersebut diorganisir oleh HTI. Para perekrut mengajak keluarga dan kawan mereka untuk menghadiri pelatihan dan diskusi HTI dengan dalih untuk mengaji atau belajar Islam dalam rangka meningkatkan pengetahuan agama. Doktrin HTI yang tertanam kuat dalam benak para aktivis HTI membuat mereka begitu aktif mencari anggota baru. Para aktivis HTI memandang dakwah sebagai kewajiban seumur hidup bagi setiap Muslim.

- b. Eksistensi Gerakan Sosial Eks HTI di Bengkulu masih ada. Maka perlawanan yang mereka jalankan dengan pemikiran eks HTI memberikan solusi dengan membentuk komunitas baru atau istilahnya perahu kecil.

Tetap menjalankan aktifitas dakwah nya Mempaparkan penjajahan yang masih mecerkram di neregri ini, dengan sdm yang masih d kuasi oleh asing. Kemudian beliau memberikan solusi yang sebenar-benarnya menyelesaikan permasalahan umat saat ini adalah dengan kembali pada islam.

Aktivitas intelektual HTI menemukan ekspresinya lewat seminar dan publikasi. Ini tentu saja merupakan strategi untuk menyebarkan ide-ide HTI dan menarik dukungan dari segmen terdidik dari masyarakat Indonesia. Seminar aktif dilaksanakan mulai dari media online, seperti wa, yotube dan pertemuan seminar di lakukan di Hotel.

Selain itu, gerakan sosial juga memiliki komponen-komponen didalamnya. Suatu gerakan sosial dapat dikatakan sebagai sebuah interseksi dari adanya unsur-unsur yang ada pada fenomena sosial. Unsur yang dimaksud memiliki berbagai macam bentuk, seperti aksi sukarela, asosiasi sukarela, professionalized reform, kepentingan kelompok, kebijakan sosial, negara, partai politik, perubahan sosial, media massa, discource & ideology, opini public, perilaku kolektif dan aksiindividu.

- c. Pola Gerakan sosial eks HTI bersifat non konfrontatif dengan melakukan diskusi publik dibanding Aksi Demonstrasi. Pasca pembubaran yang dilakukan oleh para eks HTI dengan Upaya yang mereka lakukan adalah dengan acara melakukan dakwah-dakwah islam, melakukan kelompok-kelompok pengajian (Qalako), Liqo atau kajian-kajian islam. Upaya dari

anggota HTI dan ormas sejenis untuk mengganti kata HTI menjadi sebuah gerakan baru yang punya pola yang baru.

- d. Tahap Tahap Gerakan Sosial Eks HTI, pendirian lembaga, Framing isu, pengkaderan, pemberdayaan dan penguasaan Negara. Metode yang di gunakan mereka dengan cara berdakwa melalui jejaring tersebut dengan cara yang lebih halus. Meskipun sudah di bubarkan di Bengkulu namun pola pikir mereka tentang islam kaffah itu masih ada.

HTI melalui forum-forum public, seperti seminar, diskusi, talkshow, tabligh akbar, pengajian-pengajian dan lain sebagainya yang dilakukan diwilayah provinsi Bengkulu. Yang dilakukan dalam waktu yang cukup lama.

2. Saran

Pemerintah Tidak perlu untuk Melarang kegiatan Eks HTI saat ini karena belum terlihat gerakan yang membahayakan bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara, namun pemerintah perlu mengedukasi dan mengawasi komunitas-komunitas yang ada agar kegiatan Eks HTI tidak melenceng dari nilai Pancasila dan UUD 1945

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal:

- Abdul Qohar dan Kiki Muhamad Hakiki. (2017). *"Eksisten[si Gerakan Ideologi Transnasional HTI Sebelum dan Sesudah Pembubaran. Jurnal Kalam UIN Raden Intan Lampung, Volume 11, Nomor 2,*
- Abdurrahman Wahid.(2009). *"Ilusi Negara Islam : Ekspansi Gerakan Transnasional di Indonesia."* Jakarta : The Wahid Institute
- Abu Afif dan Nur Khalish. (2009). *"Mengenal Hizbut Tahrir dan Strategi Dakwah Hizbut Tahrir"*
Bogor: Pustaka Thariqul Izzah
- Ahmad Syafi'i Mufid. (2011). *"Perkembangan Paham Keagamaan Transnasional di Indonesia"*.
Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI
- Agus Salim. *"The Rise of Hizbut Tahrir Indonesia (1982-2004) : Its Political Opportunity Structure, Resource Mobilization, and Collective Action Frames."*
Syarif Hidayatullah State Islamic University, 2005.
- Al-Nabhani, Taqiyuddin, At-Takattul Al-Hizbiy." Jakarta : Hizbut Tahrir Indonesia, 2001.
- Azman. (2018). "Gerakan Dan Pemikiran Hizbut Tahrir Indonesia." Jurnal Ad-Daulah, Vol. 7 / No. 1
- Dian Dwi Jayanto tentang. *"Manifestasi Politik Identitas HTI di Kalangan Nadliyin : Studi Kasus HTI di Kabupaten Jombang."* Skripsi mahasiswa Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UNAIR, 2017.
- Fadillah Putra Dkk. *"Gerakan Sosial."* Malang : Averrors Press, 2006.
- Greg Fealy. 2017 *"Hizbut Tahrir in Indonesia: Seeking a "Total" Islamic Identity"*. Edited by Shahram
- Akbarzadeh dan Fethi Mansouri. (2007) London and New York : Tauris Academic Studies.
- Hizbut Tahrir. (2000). *"Mengenal Hizbut Tahrir : Partai Politik Islam Ideologis."*
Jakarta : Pustaka Thariqul Izzah.
- Itok Dwi Kurniawan. (2018). *"Pembubaran hizbut tahrir indonesia ditinjau dari Perspektif kewarganegaraan liberal dan Kewarganegaraan republic."* Dosen Universitas Sebelas Maret Surakarta

Jamhari & Jajang Jahroni. (2004). *“Gerakan Salafi Radikal di Indonesia.”* Jakarta : Raja Grafindo Persada

Kamilatul Fitriyah. 2016. Cara Dakwah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Yogyakarta (Studi Angkringan Dakwah). Skripsi Pada Fakultas dan Dakwah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Mohamad Rafiuddin. *“Mengenal Hizbut Tahrir” (Studi Analisis Ideologi Hizbut Tahrir vis a vis NU)*. Jurnal Islamuna Volume 2 Nomor 1 Juni, 2015.

Masdar Hilmy. (2011) *“Akar-Akar Transionalisme Islam Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)”*. Jurnal Islamica, Volume. 6, Nomor. 1

Nilda Hayati. (2017) *“Konsep Khilafah Islamiyyah Hizbut Tahrir Indonesia (Studi Living Qur’an Perspektif Komunikasi)”*. Jurnal Epistemé, Volume. 12, Nomor. 1

Sidney Tarrow, (1998). *Power Movement, Social Movement dan Contentious Politics*. Cambridge : Cambridge University Press.

Sudarmo Shobron. (2014) *“Model Dakwah Hizbut Tahrir Indonesia”*. Jurnal Studi Islam Profetika, Volume. 15, Nomor. 1, 44 – 62.

Sudarwan Danim. (2002) *“Menjadi Peneliti Kualitatif (Rancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian Untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora.”* Bandung : Pustaka Setia.

Sugiyono. (2002) *“Metode Penelitian Kualitatif dan R & D.”* Bandung: Alfabeta.

Syahrial Syarbaini. *“Dasar-Dasar Sosiologi.”* Yogyakarta. Graha Ilmu, 2013.

Putra, Fadillah , Konsep, Aktor, Hambatan Dan Tantangan Gerakan Sosial Di Indonesia. Malang: 2006, Averroes Press, hal 48-58

Benford and Snow, David. 2000, “Framing Processes and Social Movements: An Overview and Assessment, journal Annu. Rev. Sociol. vol 26:611–39, hal 4
Media Internet:

www.cnnindonesia.com www.kompas.com www.faktualnews.co

<https://bengkuluekspress.com>